

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BOGOR TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di bidang pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan daerah secara berjangka dengan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BOGOR TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD.

BAB II

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 2

Sistematika RPJPD terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Kondisi Umum Daerah
- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
- Bab V Penutup

BAB III

ISI DAN URAIAN RPJPD

Pasal 3

Isi beserta uraian RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penjabaran dari RPJPD akan ditindaklanjuti dalam RPJMD yang berisikan visi, misi, dan program kepala daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintah tahun berikutnya.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009 dijadikan tolak ukur pelaksanaan pembangunan tahap pertama di dalam RPJPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 Agustus 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
BAMBANG GUNAWAN S.

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2009
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
(RPJP) DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2005-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Perubahan arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era reformasi tahun 1998, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga pengembangan wilayah dapat dicapai secara optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*.

Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut untuk segera disusun adalah: Rencana Pembangunan Jangka

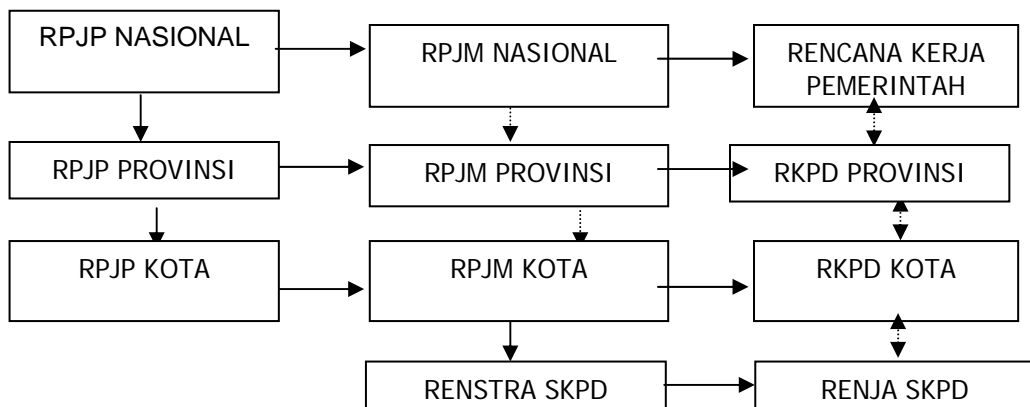
Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pembangunan di daerahnya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. Sementara, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih selama lima tahun masa jabatannya.

1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. Sementara, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih selama lima tahun masa jabatannya.

Gambar 1.1. Bagan Hierarki Perencanaan



1.3. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan RPJP Daerah adalah:

- a. agar tersedia dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahunan; dan
- b. agar tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah:

- a. mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan;
- b. merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kota Bogor dalam jangka panjang 20 tahun ke depan,
- c. mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleransi, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

1.4. Landasan hukum

Penyusunan RPJP Daerah memiliki landasan hukum yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- l. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- p. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
- q. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- r. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
- s. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor
- t. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
- u. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

1.5. Sistematika Penyusunan RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kondisi Umum Daerah
Bab III	Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025
Bab IV	Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025
Bab V	Penutup

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI SAAT INI

2.1.1. Fisik dan Prasarana

A. Kondisi umum Fisik Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak pada 106,48° Bujur Timur dan 6,36° Lintang Selatan. Terletak pada jarak ± 60 km di selatan Ibu Kota Negara dan ± 180 km dari Bandung, ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kota dengan luas 11.850 Ha ini pada tahun 2005 berpenduduk 855.085 jiwa (BPS, 2005) dan tersebar di enam Kecamatan (68 Kelurahan). Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor sehingga menjadi pusat pertumbuhan Bogor Raya.

Batas-batas administrasi Kota Bogor adalah :

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Dalam konteks Regional, Kota Bogor merupakan:

1. Pusat pengembangan di Wilayah VII Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang melayani daerah sekitarnya, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
2. Kota penyangga ibukota yang diarahkan untuk menampung 1,5 juta jiwa pada tahun 2025, dalam rangka mengurangi tekanan kependudukan di Jakarta, BOGOR, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK).
3. Kota yang mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional.

Dalam Konteks Internasional Kota Bogor merupakan salah satu cagar budaya (*world heritage*) dengan keberadaan Kebun Raya. Kebun Raya dan beberapa wilayah di lingkungan Kota Bogor yang masih hijau menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik. Dengan demikian Kota Bogor harus menyiapkan diri menjadi kota Jasa yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional /Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Bogor.

Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, kurang teraturnya penataan kota, menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari padatnya penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Posisi yang strategis sebagai salah satu penyangga ibu kota serta kondisi alamnya yang relatif lebih nyaman dibanding dengan kota penyangga lainnya, membuat kota Bogor menjadi pilihan bagi pendatang, baik yang datang dari sekitar Bogor maupun para perantau dari daerah-daerah lainnya yang menjadikan Kota Bogor sebagai sumber untuk mencari mata pencaharian. Kondisi tersebut memberikan dampak yang luas bagi Kota Bogor baik dalam tatanan kemasyarakatan, perekonomian, dan kondisi lainnya.

Kota Bogor dikelilingi oleh bentangan pegunungan yaitu Gunung/Pegunungan Pancar, Megamendung, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun sehingga penampakan wilayahnya berbukit dan bergelombang. Ketinggiannya bervariasi antara 190-350 mdpl.

Terdapat dua sungai utama yang mengalir di kota Bogor yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane dengan beberapa anak sungainya. Keberadaan dua sungai utama ini tentunya memberikan batasan pembangunan, karena kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kawasan lindung.

Dilihat dari kondisi geologisnya, secara umum Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango (berupa batuan breksi tupaan/kpbb) dan Gunung Salak (berupa alluvium/kal dan kipas alluvium/kpal). Lapisan batuan ini berada agak dalam dari permukaan tanah dan jauh dari aliran sungai. Endapan permukaan umumnya berupa *alluvial* yang tersusun oleh tanah, pasir dan kerikil hasil pelapukan endapan yang sangat baik untuk vegetasi. Dari struktur geologi tersebut, Kota Bogor memiliki jenis aliran Andesit seluas 2.719,61 Ha, Kipas Aluvial seluas 3.249,98 Ha, Endapan 1.372,68 Ha. Tufaan 3.395,17 Ha dan Lanau Breksi Tufan dan Capili seluas 1.112, 56 Ha.(BPS, 2005)

Curah hujan rata-rata di wilayah Kota Bogor berkisar antara 3.000 sampai 4.000 mm/tahun. Curah hujan bulanan berkisar antara 250 – 335 mm dengan waktu curah hujan minimum terjadi pada bulan September sekitar 128 mm, sedangkan curah hujan maksimum terjadi di bulan Oktober sekitar 346 mm. Temperatur rata-rata wilayah Kota Bogor berada pada suhu 26° C, temperatur tertinggi sekitar 34,4 ° C dengan kelembaban udara rata-rata lebih dari 70 %. Kecepatan angin rata-rata per tahun adalah 2 km/jam dengan arah Timur Laut.

B. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Secara hidrogeologi, adanya sungai-sungai besar yang melintasi Kota Bogor akan turut memberikan batasan dalam pengembangannya karena wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) juga merupakan termasuk dalam kawasan lindung.

Kondisi kualitas udara jika dilihat dari parameter debu masih cukup baik. Hasil pemantauan parameter debu di 13 titik menunjukkan bahwa kesemua lokasi belum melebihi baku mutu lingkungan ($230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$) kecuali di lokasi Warung Jambu yang telah mencapai $286,6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Parameter lainnya seperti timbal (Pb) sebesar $1,43 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ masih berada di bawah baku mutu $2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Tetapi, parameter NO₂ pada beberapa lokasi pengamatan sebesar $168,11 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ telah melebihi baku mutu $150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Polusi suara berada di tingkatan yang mengkhawatirkan. Ke-13 lokasi pengamatan menunjukkan bahwa tingkat kebisingan ada di kisaran 71,7 dbA, melebihi baku mutu lingkungan yang sebesar 60dbA.

Parameter kualitas air sungai masih sesuai dengan baku mutu, kecuali untuk parameter bakteri coli tinja yang telah melebihinya. Pada bagian hulu sungai, kandungan bakteri coli tinja sebanyak 56 ribu jumlah/100 ml, bagian tengah sebanyak 180 ribu jumlah/100 ml, dan bagian hilir sebanyak 410 ribu jumlah/100 ml, padahal baku mutunya adalah sebanyak 2 ribu jumlah/ 100 ml. Hal ini terjadi akibat banyak rumah tangga tidak bersanitasi sehingga buangan limbah domestik langsung disalurkan ke sungai.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor yang terdiri dari 13 jenis RTH berdasarkan pendataan tahun 2005 mempunyai potensi seluas 51,85 % dari luas Kota Bogor, menurun bila dibandingkan tahun 2000 yang seluas 59,68 %. Penurunan tersebut diakibatkan kebutuhan ruang bagi aktivitas penduduk seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bogor seperti kebutuhan akan perumahan. RTH yang bersifat publik (yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor) mempunyai luas 4 %. Ketentuan minimum ruang terbuka hijau perkotaan adalah 30 % dari luas wilayah, yakni 20 % bersifat publik dan 10 % bersifat privat.

C. Kondisi Tata Guna Lahan

Kegiatan penduduk akan mencerminkan pola penggunaan lahan yang terjadi. Berdasarkan kondisi eksisting pada tahun 2005 Kota Bogor mempunyai luas wilayah 11.850 Ha yang secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Kawasan Terbangun: luas total penggunaan sebesar 5.945 Ha atau sekitar 50,2 % dari total luas Kota Bogor, berupa lahan perumahan dan permukiman, serta komersial dan lainnya.
- b. Kawasan Belum Terbangun: luas total sebesar 5.905 Ha atau 49,8 %, berupa lahan pertanian dan daerah terbuka hijau.

Dari data penggunaan lahan tersebut, penggunaan lahan yang dominan adalah untuk kegiatan perumahan dan permukiman yaitu sebesar 4.577 Ha (38,63 % dari luas lahan kota). Hal ini dikarenakan Kota Bogor secara riil berperan sebagai sub-urban dari Jakarta sehingga banyak menarik pendatang untuk memilih Kota Bogor menjadi tempat tinggal (*dormitory town*). Pengembangan perumahan di Kota Bogor pada saat ini masih dengan menggunakan konsep *landed house* atau berkembang secara horizontal. Untuk mengantisipasi keterbatasan lahan di Kota Bogor, terutama di kawasan pusat kota maka sebaiknya dimulai pembangunan rumah dengan konsep vertikal untuk semua golongan, baik itu rumah susun maupun apartemen.

Pola penyebaran daerah terbangun juga masih berpusat di Pusat Kota Bogor, sedangkan daerah pinggiran relatif lebih kecil dari penggunaan lahan terbangun, terutama di Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, di Tanah Sereal dan Bogor Utara. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di pusat kota. Untuk daerah pinggiran, pola ruangnya adalah bersifat memita (*ribbon*) terutama pada ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Raya Pajajaran, Jalan Raya Tajur dan Jalan Raya Sholeh Iskandar. Hal ini mengakibatkan bangkitan perjalanan di Kota Bogor berpusat pada ruas-ruas jalan tersebut sehingga jalan-jalan tersebut yang seharusnya berfungsi arteri tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

D. Transportasi

1. **Prasarana** transportasi berupa ruas jalan dalam kota, sebagian besar terdiri dari 2 jalur untuk dua arah. Demikian pula jaringan jalan penghubung Kota Bogor dengan kota sekitarnya terdiri dari 2 jalur untuk dua arah, namun masih terdapat lebar jalan yang belum simetris (*bottle neck*) dan belum lebar (lebar 3 – 5 m) khususnya di pinggiran Kota. Hal ini perlu diantisipasi bahwa semakin meningkatnya pergerakan serta peningkatan pembangunan perumahan di wilayah pinggiran Kota akan membutuhkan infrastruktur transportasi penghubung yang memadai. Jaringan transportasi Kota Bogor saat ini cenderung berpola radial konsentrik yang berpusat pada Pusat Kota. Kondisi ini menyebabkan timbulnya beberapa titik kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Kondisi panjang jalan di Kota Bogor tahun 2005 adalah 620.595 km, terdiri atas 33.810 km jalan negara, 6.358 km jalan Provinsi dan 580.427 km jalan kota. Sedangkan kualitas jalan di Kota Bogor tahun 2005 adalah: jalan baik sekali 5,67 %, sedang 39,96 %, rusak 27,63 %, dan rusak berat 24,81 %. Adapun jenis perkerasan permukaan jalannya adalah : permukaan aspal 86,05 %, Kerikil 3,24 %, tanah 1,46 %, beton/conblok 6,3 %, dan tidak dirinci 2,95 %. Terdapat 2 (dua) tipe terminal untuk kendaraan umum di Kota Bogor yaitu: 1 (satu) unit terminal Tipe A Baranangsiang yang mempunyai daya tampung 102 unit kendaraan untuk trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ; 2 (dua) terminal Tipe C yaitu terminal Bubulak dan terminal Merdeka yang melayani angkutan kota.

Kota Bogor mempunyai 2 (dua) stasiun kereta api yaitu Stasiun Kereta Api Bogor sebagai stasiun utama dan Stasiun Batu Tulis sebagai stasiun pembantu. Stasiun Bogor sangat berperan dalam melayani pergerakan penduduk yang menuju Jakarta, setiap harinya tercatat digunakan lebih dari 28.572 orang. Namun dengan terpusatnya pergerakan orang dan barang, di Stasiun Bogor menyebabkan kemacetan dan kekumuhan di kawasan Pusat Kota khususnya sekitar Stasiun Bogor.

2. **Moda**, semakin meningkatnya kebutuhan akan moda transportasi, menimbulkan pertumbuhan jumlah moda/kendaraan yang lebih di Kota Bogor. Dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2005 rata-rata pertumbuhannya sebesar 32 %. Moda/kendaraan yang terdaftar di Kota Bogor pada tahun 2005 adalah 120.635 kendaraan, dengan didominasi oleh keberadaan kendaraan pribadi sebanyak 111.013 unit (92,02 %) dan kendaraan umum sebanyak 9.622 unit (7,98 %). Kendaraan pribadi yang ada didominasi oleh sepeda motor, dimana jumlahnya mencapai 73.146 unit (65,89 %) dari keseluruhan jumlah kendaraan pribadi dan sisanya adalah kendaraan beroda 4 dan sepeda non motor. Pertumbuhan yang tinggi dari kendaraan pribadi bila dicermati sebenarnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah sepeda motor, hal ini terjadi karena kondisi kesediaan jalan yang terbatas, sehingga menimbulkan kepadatan yang tinggi. Pemilihan sepeda motor sebagai sarana transportasi dilakukan oleh penduduk untuk menjawab kebutuhan dalam melakukan pergerakan secara cepat dan murah. Untuk pelayanan angkutan umum, Kota Bogor sangat bergantung kepada penggunaan moda mobil penumpang umum berkapasitas 12 orang per unitnya. Dengan pemilihan moda mobil penumpang umum tersebut bila dibandingkan skala Kota Bogor pada saat ini menjadi tidak tepat, karena untuk menampung pergerakan pada jam-jam sibuk akan membutuhkan jumlah yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan pada jam-jam sibuk keberadaan angkutan umum makin menyebabkan kepadatan di jalan-jalan Kota Bogor, dan pada jam-jam lengang, karena ingin bersaing untuk mendapatkan pendapatan yang setinggi-tingginya, angkutan umum yang ada tetap beroperasi walaupun tidak banyak penumpang, namun keberadaannya tetap menggunakan sebagian besar kapasitas jalan yang ada.

3. **Pola Pergerakan**, perjalanan yang terjadi di Kota Bogor adalah 1.063.753 perjalanan orang/hari (perjalanan *Internal - internal*), sedangkan perjalanan yang melintasi Kota Bogor (perjalanan *eksternal - eksternal*) adalah 675.354 perjalanan orang/hari. Khusus perjalanan dari Kota Bogor menuju Jakarta adalah 53.188 perjalanan orang/hari atau sekitar 5 % dari total perjalanan yang terjadi dengan penggunaan angkutan umum sekitar 48,83 % atau sebesar 25.972 perjalanan orang/hari. Sedangkan untuk pola pergerakan dengan menggunakan moda Kereta Api, berdasarkan sumber pencatatan Stasiun Bogor, pada 2004 terdapat pergerakan berangkat dari Stasiun Bogor sebanyak 10.457.405 perjalanan orang/tahun atau 28.572 perjalanan orang/hari. Pola pergerakan, jumlah kendaraan, kondisi pelayanan angkutan umum serta kualitas prasarana jalan yang tidak memadai menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa titik, khususnya di persimpangan, di stasiun maupun di pusat-pusat kegiatan ekonomi Kota Bogor.

E. Sarana, Prasarana dan Utilitas Kota

Penyediaan energi, untuk energi kelistrikan Kota Bogor dilayani oleh 7 Gardu Induk (GI) yakni Gardu Induk Ciawi kapasitas 2 x 30 MVA, Gardu Induk Kedungbadak kapasitas 2 x 30 MVA, Gardu Induk Bogor Baru kapasitas 2 x 60 MVA, Gardu Induk Karacak kapasitas 2 x 30 MVA, Gardu Induk Cibinong kapasitas 2 x 60 MVA, dan Gardu Induk Sentul kapasitas 2 x 60 MVA yang disediakan oleh PT. PLN. Untuk mendistribusikan jaringan listrik ini terdapat 50 gardu distribusi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor. Sampai tahun 2005, pola distribusi yang ada, cakupan layanan listrik di Kota Bogor telah mencapai 99,335 % dari seluruh wilayah Kota Bogor. Pasokan listrik Kota Bogor terkait dengan jaringan transmisi Jawa-Bali, yang sampai tahun 2025 masih mencukupi bila proyek 10.000 MW terwujud di tahun 2009. Untuk tipe konstruksi jaringan listrik, masih menggunakan saluran udara (di atas tanah) sehingga mempunyai resiko tinggi.

Disamping energi listrik, juga terdapat pelayanan sumber energi lain yaitu gas yang pelayanannya dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN). Perkembangan layanan distribusi gas ini juga berkembang dengan sangat pesat dimana tingkat perumbuhan pelanggannya meningkat sebesar 204,92 % dalam kurun waktu tahun 1999-2005. Total gas yang tersalurkan di akhir tahun 2005 telah mencapai 222.068.209 m³.

Penyediaan air bersih untuk seluruh masyarakat Kota Bogor dilayani oleh BUMD PDAM Tirta Pakuan dan sebagian oleh BUMD PDAM Tirta Kahuripan (Kabupaten Bogor). Penyediaan air bersih ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber mata air dan sungai yang ada di Kota Bogor. Total penyaluran air bersih oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tahun 2005 adalah 24.007.048 m³ dari jumlah pelanggan 70.014 sambungan. Distribusi penyaluran air bersih ini telah melayani 67,91 % dari keseluruhan penduduk Kota Bogor (diluar yang terlayani oleh PDAM Tirta Kahuripan). Selain memperoleh layanan air bersih dari PDAM, sebagian masyarakat Bogor untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya sehari-hari didapatkan melalui cara pengambilan air tanah dan air permukaan. Saat ini Kota Bogor masih belum dihadapkan pada krisis air, mengingat sumber air baik dari mata air tangkil, bantar kambing dan Kota Batu maupun dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cipaku dan Dekeng menghasilkan debit air yang masih memadai yakni 1.125 liter per detik.

Sarana dan prasarana telekomunikasi sampai tahun 2005 telah mampu melayani 80% kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Melalui PT Telkom Kandatel Bogor telah berhasil ditingkatkan pelayanan sambungan hingga mencapai 333.467 Satuan Sambungan Telepon (SST), dari berbagai jenis layanannya, baik untuk bisnis, perumahan maupun telepon umum. Untuk daerah-daerah tertentu yang belum dapat terlayani oleh jaringan kabel Telkom, pelayanannya telah dapat dijangkau oleh jaringan telekomunikasi nir-kabel (*wireless*), baik itu yang disediakan oleh PT Telkom maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang bergerak di bidang telekomunikasi. Adapun untuk layanan komunikasi data, telah dilayani oleh jaringan internet berkapasitas lebar baik itu dengan menggunakan kabel maupun dengan nir-kabel yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam menangani permasalahan sampah padat, Kota Bogor masih menggunakan sistem konvensional yaitu dikumpulkan di beberapa titik pengumpulan lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir. Jumlah produksi sampah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di Kota Bogor diperkirakan mencapai 2.137 m³ per hari, dimana sampah yang dihasilkan adalah 58 % adalah sampah organik. Dari jumlah sampah yang dihasilkan ini baru dapat terangkut menuju TPA sebesar 68,8%. Hal ini disebabkan keterbatasan armada truk pengangkut sampah. Karena tidak semua sampah dapat terangkut maka akibatnya sampah yang tidak terangkut dibuang oleh masyarakat ke sungai atau ke lahan kosong yang ada sehingga menimbulkan dampak negatif baik kepada lingkungan maupun kebersihan serta kesehatan masyarakat.

Pengolahan limbah cair di Kota Bogor secara umum masih belum berjalan dengan baik. Indikasi ini terlihat dari indikasi pencemaran air di Kota Bogor yang telah berada di atas batas mutu untuk beberapa kriteria. Kontaminasi ini terutama ditimbulkan dari limbah cair rumah tangga yang pembuangannya tidak dengan menggunakan kaidah pengolahan limbah yang benar. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor pada tahun 2005 hanya 22,53 % penduduk yang rumahnya dilengkapi dengan tangki septik. Sebagai akibatnya maka hampir 80 % kegiatan rumah tangga di Bogor turut berpartisipasi dalam pencemaran air di Kota Bogor akibat tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah tangga yang baik dan terpadu.

Sarana Pendidikan di Kota Bogor secara fisik jumlahnya sudah memadai, namun ketersebarannya sesuai jenjang pendidikan belum memadai. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bogor pada tahun 2005, di Kota Bogor terdapat 286 sarana pendidikan usia pasca balita (TK, Diniyah, dan RA), 366 sarana pendidikan dasar (SD dan Ibtidaiyah), 145 sarana pendidikan menengah pertama (SMP dan Tsanawiyah), 110 sarana pendidikan menengah atas (SMA, SMK, dan Aliyah) dan 9 sarana pendidikan tinggi (Akademi, Sekolah Tinggi dan Perguruan Tinggi).

Sarana Kesehatan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor pada tahun 2005 sudah memadai. Di Kota Bogor terdapat 24 unit Puskesmas RRI, 22 unit Puskesmas Pembantu, 3 Puskesmas Keliling, dan 9 Rumah Sakit. Selain itu Pelayanan Kesehatan di Kota Bogor juga didukung oleh 8 rumah bersalin, 77 balai pengobatan, 556 praktek dokter, 737 apotek, 28 toko obat berizin, dan 16 laboratorium kesehatan.

Untuk melayani kebutuhan rohani di Kota Bogor, telah tersedia sarana ibadah yang tersebar di Kota Bogor. Berdasarkan data Kota Bogor Dalam Angka (BPS,2005) sarana peribadatan yang tersedia adalah 634 mesjid, 753 musholla, 27 Gereja Protestan, 8 Gereja Khatolik, dan 9 wihara Budha. Sarana ini hampir seluruhnya dibiayai oleh swadaya masyarakat dalam pengadaan dan perawatannya.

Mengingat Kota Bogor secara regional mempunyai fungsi utama sebagai pusat kegiatan bagi daerah-daerah sekitarnya, maka kegiatan jasa dan perdagangan memiliki aktivitas yang tinggi di Kota Bogor. Untuk menampung aktivitas tersebut maka di Kota Bogor dibangun fasilitas-fasilitas perdagangan yang melayani tidak hanya lokal tetapi juga untuk pasar regional. Berdasarkan data Disperindagkop pada tahun 2005 fasilitas-fasilitas perdagangan yang berada di Kota Bogor adalah 4 pasar regional, 5 pasar lokal, 7 pasar modern/supermarket, 388 toko dan 2.212 warung.

2.1.2. Ekonomi

Laju Inflasi Kota Bogor dilihat dari rata-rata selama 5 tahun terakhir (2001-2005) sebesar 11,18 %. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah mengurangi subsidi BBM pada tahun 2005.

Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB kota Bogor rata-rata selama lima tahun terakhir (2001-2005) adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10.40 %, yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.34 %
 - Dana Perimbangan sebesar 8.68 %
2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor pada tahun 2005 sebesar 74,94 yang terdiri dari Indeks Kesehatan sebesar 78 %, Indeks Pendidikan 88,10 serta Indeks Daya Beli 58,71.

Adanya berbagai upaya penanganan krisis dan didukung oleh penerapan otonomi daerah yang lebih luas memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berdampak pada perbaikan kondisi perekonomian Kota Bogor. Perbaikan kondisi tersebut bisa dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000, selama 5 tahun (2001-2005) mencapai rata-rata Rp. 3.181.424,52 juta atau rata-rata per kapita sebesar Rp. 3.888.071,98 per tahun. PDRB sektor primer tercatat sebesar Rp. 11.680,58 juta, sektor sekunder sebesar Rp. 1.230.386,77 juta dan sektor tersier sebesar Rp. 1.939.357,24 juta.

Berdasarkan data Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor (BPS,2005) menyebutkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor selama 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 5,95 %. Sektor yang pertumbuhannya paling tinggi dari tahun 2001-2005 adalah sektor tersier.

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap struktur perekonomian yang terdapat pada suatu wilayah dilakukan analisis dengan mengklasifikasi lapangan-lapangan usaha ekonomi dalam klasifikasi sektor-sektor ekonomi yaitu:

A. Sektor Primer

Selama lima tahun (2001-2005), kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB akan semakin menurun sebesar 0,37 % terhadap nilai total PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan 4,45 %. Angka-angka ini sangat kecil, karena sektor pertanian masih menghadapi beragam permasalahan yang

perlu ditangani, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas, efesiensi usaha, lahan yang semakin menyempit akibat konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya kredit dan pemanfaatan teknologi pertanian yang masih kurang. Sub sektor pertanian mencakup sub-sektor tanaman pangan, sub-sektor peternakan dan sub-sektor perikanan.

1. **Sub-sektor Tanaman Pangan;** Komoditasnya antara lain padi, palawija (kedelai dan kacang tanah), dan sayur-sayuran (pitsai/sawi, bawang merah dan tomat). Kontribusinya sebesar 0,21 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan 6,06 %.
2. **Sub-sektor Perkebunan;** Komoditasnya antara lain durian, jambu biji, mangga, pepaya, nenas, jeruk serta nangka. Kontribusinya sebesar 0,0005 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan 4,83 %.
3. **Sub-sektor Peternakan;** Komoditasnya antara lain sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam dan itik. Adanya komoditi hewan besar disebabkan adanya ternak yang masuk dari luar kota ke dalam lokasi transit di Kota Bogor sebelum dikirim ke Rumah Potong Hewan (RPH). Kontribusinya sebesar 0,10 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan 2,96 %.
4. **Sub-sektor Perikanan;** Komoditi yang dihasilkan di Kota Bogor terbatas pada perikanan darat yaitu pemeliharaan di Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Sawah dan Keramba. Selain perikanan konsumsi, di Kota Bogor juga dikembangkan komoditas ikan hias yang sudah menembus pasar ekspor. Kontribusi sektor ini sebesar 0,06 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan 1,26 %.
5. **Sub-sektor Pertambangan/Penggalian** Potensi bahan tambang/galian, baik golongan A, B maupun C, dapat dikatakan tidak ada di wilayah Kota Bogor. Produk Domestik Bruto Kota Bogor yang berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah nihil.

B. Sektor Sekunder

Sektor Sekunder merupakan sektor ekonomi yang lebih bertumpu pada pengintegrasian sumber daya manusia, modal, teknologi dan bahan baku yang berasal dari hasil sektor primer. Sektor ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas, air minum dan konstruksi. Sumbangan Sektor ini terhadap PDRB Kota Bogor selama 5 tahun terakhir (2001-2005) adalah sebesar 38,67 %, dengan laju pertumbuhan 5,99 %.

1. **Sub-sektor Industri Pengolahan;** Industri pengolahan berskala besar yang terdapat di Kota Bogor pada tahun 2005 terdapat 75 unit usaha yang didominasi oleh industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit, yakni 22 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 29.429 orang; diikuti industri makanan dan minuman sebanyak 15 perusahaan dengan tenaga kerja 2.694 orang. Kontribusinya sebesar 27,84 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan 6,48 % Hasil-hasil industri pengolahan di Kota Bogor sebagian telah menjadi komoditas ekspor yang diekspor ke berbagai negara. Pada tahun 2005, komoditi ekspor yang dihasilkan Kota Bogor sebesar US\$ 115.297.534,83.
2. **Sub-sektor Listrik, Gas dan Air Minum ;** kontribusinya sebesar 3,10 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan 6,92%.
 - a. **Industri energi listrik** sampai pada tahun 2005 memiliki jumlah pelanggan sebesar 170.480 pelanggan, dengan daya tersambung 183.531.641 kwh.
 - b. **Penyediaan gas** di Kota Bogor dikelola oleh PT. PGN, Tbk. Perkembangan layanan distribusi gas, saat ini berkembang dengan sangat pesat dimana tingkat perumbuhan pelanggannya meningkat sebesar 204,92% dalam kurun waktu tahun 1999-2005. Total gas yang tersalurkan di akhir tahun 2005 telah mencapai 222.068.209 m³.
 - c. **Penyediaan air minum** di Kota Bogor sampai saat ini masih dikelola oleh Kota Bogor. Pada tahun 2005, jumlah pelanggan PDAM di kota Bogor 70.014 pelanggan dan besarnya pemakaian PDAM adalah 24.007.048 meter kubik dengan nilai Rp.45.261.milyar.
3. **Sub-sektor Bangunan/Konstruksi;** sub sektor ini meliputi pembangunan fisik (konstruksi) baik yang digunakan sebagai tempat tinggal (pemukiman) atau sarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupun perorangan. Kontribusinya sebesar 7,73 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,94 %.

C. Sektor Tersier

Sektor Tersier merupakan sektor ekonomi yang bertumpu pada nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia dan tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk Jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa.

1. **Sub-sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran** selama 5 tahun terakhir (2001-2005) memberikan kontribusi rata-rata 31,16 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,94 %.
2. **Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran**; Sub Sektor ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan daya beli masyarakat. Peningkatan produksi dan relatif stabilnya daya beli masyarakat menyebabkan sub sektor ini memberikan kontribusi terbanyak dalam sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Kontribusinya sebesar 24,72 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,58 %.
3. **Sub-sektor Hotel dan Restoran**; Arus kunjungan wisatawan ke Kota Bogor terutama di hari libur cukup banyak, seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi terutama operasional perdagangan dan jasa di Kota Bogor. Dalam rangka memenuhi permintaan dan sekaligus menjamin keamanan/kenyamanan pengunjung yang datang, maka pengusaha telah menyediakan hotel dan akomodasi lainnya di Kota Bogor. Di Kota Bogor terdapat 8 Hotel Bintang dengan 597 kamar, 35 Hotel Melati dengan jumlah kamar 843 unit. Kontribusinya sebesar 6,45 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,36 %.
4. **Sub-sektor Pengangkutan dan Komunikasi**, Lokasi Kota Bogor yang dekat dengan ibukota dan banyaknya penduduk yang bekerja di ibukota Jakarta, menyebabkan meningkatnya kegiatan perjalanan *commuter* (pulang-pergi) antara kedua kota tersebut. Di bidang angkutan darat, jumlah angkutan, ijin trayek, jumlah penumpang merupakan aset yang masuk dalam perhitungan PAD Kota Bogor. Jumlah penumpang kereta api yang menggunakan stasiun kota Bogor tahun 2005 sebesar 10.705.904 orang dan nilai karcis yang terjual Rp. 28.743.180.194. Jumlah angkutan kota sesuai daftar trayek adalah 3.316 kendaraan. Sub-sektor komunikasi yang mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi, tercatat jumlah kantor pos Pembantu di Kota Bogor sebanyak 13 buah dengan pendapatan sebesar Rp. 7.465.157.429,-. Kontribusinya sebesar 9,51 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,67 %.
5. **Sub-sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, persewaan dan jasa perusahaan**; Sub Sektor ini meliputi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Sewa Bangunan, dan Jasa Perusahaan. Untuk pelayanan jasa keuangan tahun 2005, di Kota Bogor terdapat lembaga keuangan formal Bank sebanyak 34 bank dengan rincian: Bank Pemerintah 8 buah,

Bank Swasta Nasional 24 buah, Bank Daerah 1 buah dan Bank Perkreditan Rakyat yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah 1 buah. Kontribusinya sebesar 12,60 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 10,33 %.

Lembaga Keuangan Bukan Bank meliputi kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi, simpan pinjam, lembaga pembiayaan, pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjang seperti pialang, penjamin emisi, dan sebagainya.

Sewa Bangunan meliputi kegiatan usaha persewaan bangunan, dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, serta usaha persewaan tanah persil.

Jasa Perusahaan meliputi kegiatan memberikan jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan peyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

6. **Sub-sektor Jasa-jasa Lainnya**, Lapangan Usaha Jasa-jasa dikelompokkan kedalam dua sub-sektor yaitu: sub-sektor **Jasa Pemerintahan Umum** dan sub-sektor **Jasa Swasta**. Kontribusinya sebesar 7,69 % terhadap PDRB Kota Bogor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,70 %.

Jasa Pemerintahan Umum Kota Bogor meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk kepentingan rumah tangga dan masyarakat umum. Nilai tambah jasa pemerintahan umum dihitung dengan pendekatan pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai.

Jasa Swasta meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan pihak swasta, misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Jasa Sosial Kemasyarakatan mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, rumah ibadat dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta. Jasa Hiburan dan Rekreasi mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga seperti jasa reparasi, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu, salon kecantikan dan sejenisnya.

Berdasarkan penjabaran Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor di atas, dapat diketahui perkembangan struktur perekonomian Kota Bogor selama periode 5 tahun terakhir (2001-2005), yang didominasi oleh sektor tersier (terdiri dari Perdagangan Besar dan Eceran, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank, Non Bank, Sewa, Jasa-Jasa Lainnya) sebesar 61,09 % , kemudian disusul oleh sektor sekunder (meliputi Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan) sebesar 38,67 % dan terakhir adalah sektor primer (Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan dan Hasil-hasilnya, dan Perikanan) sebesar 0.37 %. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dengan rata-rata sebesar 5.95 % per tahun, selama lima tahun terakhir (2001-2005) dapat menyerap tenaga kerja guna mengurangi jumlah pengangguran sebesar 292,394 orang. Jumlah penduduk miskin rata-rata selama lima tahun (2001-2005) sebesar 25.736 KK (14.60 %), rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2.99 %, dan pengangguran rata-rata sebesar 9.07 % dari penduduk usia kerja.

2.1.3. Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama

Pembangunan di bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

A. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Kedua Indikator ini menjadi indikator utama dalam Indeks Pendidikan yang akan menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2005 rata-rata lama sekolah di Kota Bogor mencapai 9,97 tahun, sedangkan angka melek huruf mencapai 98,92 %. Penduduk Kota Bogor yang masih buta aksara sebagian besar adalah penduduk usia lanjut. Indeks Pendidikan di Kota Bogor pada tahun 1999 adalah 85,60 % dan meningkat setiap tahunnya mencapai 88,10 % pada tahun 2005.

Untuk pendidikan pra sekolah selama periode sepuluh tahun telah mengalami peningkatan. Untuk mengakses pendidikan anak usia 4-6 tahun, jumlah taman kanak-kanak (TK) meningkat dari 94, pada tahun 1993 menjadi 134 pada tahun 2005, namun dari jumlah murid mengalami penurunan dari 6.820 anak menjadi 3.773 anak, sementara jumlah guru meningkat dari 452 orang menjadi 671 orang.

Jumlah Madrasah Diniyah dari 70 menjadi 132 dengan jumlah murid sebanyak 5.530 anak menjadi 10.086 anak dengan jumlah guru dari 240 menjadi 728 orang, sedangkan jumlah Raudhatul Athfal dari 64 menjadi 95 dengan jumlah murid dari 2.240 menjadi 2.704 anak.

Dalam mendukung peningkatan kualitas SDM selain pendidikan formal, juga dilaksanakan pendidikan non formal terutama bagi anak usia dibawah lima tahun seperti Kelompok Bermain (Kober) dan TPA/TPQ. Jumlah Kober dari 12 unit meningkat menjadi 45 unit dengan jumlah binaan dari 120 anak menjadi 450 anak. Sedangkan jumlah TPA dari 126 unit meningkat menjadi 203, jumlah guru dari 115 orang menjadi 225 orang dengan jumlah binaan dari 2.262 anak menjadi 3.654 anak.

Pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pada tahun 2005 telah mencapai sebesar 0,005 % terlayani PAUD dari jumlah penduduk usia dini sebanyak 65.208 anak. Meskipun cakupan ini kecil, namun pendidikan bagi usia dini bukan merupakan kewajiban, melainkan pilihan orangtua. Cakupan ini dirasakan cukup memadai sebagai penunjang dalam mendukung peningkatan kualitas SDM.

Pendidikan dasar Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) selama kurun sepuluh tahun pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan yaitu APK SD/MI meningkat dari 106,41 % pada tahun 1996 menjadi 116,11 % pada tahun 2005. Sedangkan pencapaian APM dari 89,93 % menjadi 97,74 %. Jika diamati lebih lanjut faktor utama penyebab meningkatnya APK dan APM pendidikan dasar adalah adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar serta peran serta masyarakat. APK pada jenjang pendidikan dasar cenderung telah mencapai diatas 100 %, ini bukan berarti bahwa penduduk usia sekolah dasar di Kota Bogor telah mengakses semua pendidikan dasar, karena secara nyata masih terdapat peserta didik yang putus sekolah terutama dari keluarga miskin. Pada tahun pelajaran 2004/2005 angka putus sekolah atau *drop out* pada jenjang SD/MI tercatat sejumlah 140 siswa.(SD 69 siswa dan MI 71 siswa).

Secara kuantitas SD Negeri mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya merger pada beberapa SD Negeri yang dianggap kurang efisien dari 310 SD menjadi 281 SD, namun demikian, dari jumlah murid dan gurunya mengalami peningkatan yaitu jumlah murid dari 77.336 siswa meningkat menjadi 86.538 siswa, sedangkan jumlah guru dari 2.250 orang menjadi 4.267 orang dan secara kuantitatif pelayanan pendidikan dasar pada 1996 sampai 2005 sudah cukup baik dilihat dari rasio guru terhadap murid

SD Negeri dengan rasio 1 : 20. Hal ini telah memenuhi standar minimal, tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan.

Demikian pula halnya dengan pelayanan pendidikan dasar SD Swasta sebanyak 31 unit dengan jumlah murid sebanyak 12.317 siswa, jumlah guru 737 orang sehingga rasio guru terhadap murid 1 : 17, hal ini telah memenuhi standar minimal secara kuantitas.

Jumlah MI mengalami penurunan yaitu dari 56 pada tahun 1996 menjadi 55 pada tahun 2005 dengan jumlah kelas dari 260 kelas menjadi 217 kelas, begitu pula dengan jumlah murid mengalami penurunan yaitu dari 8.826 siswa menjadi 8.732 siswa pada tahun 2005, sedangkan jumlah guru mengalami peningkatan dari 467 orang menjadi 474 orang dan secara kuantitatif pelayanan pendidikan dasar pada 1996 sampai 2005 sudah cukup baik dilihat dari rasio guru dengan murid yaitu 1 : 18.

Ketersediaan tenaga pendidik secara kualitas belum sepenuhnya memadai. Pada tahun 2005 tercatat jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang menjadi persyaratan pada jenjang SD/MI minimal lulus S-1 yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jumlah guru SD Negeri yang belum memiliki kualifikasi yang disyaratkan sebesar 17,63 %, guru SD Swasta sebesar 50 %, dan pada guru MI sebesar 30,60 %.

Pada tahun 2005 dari 1.695 ruang kelas belajar pada SD Negeri, 45,61 % mengalami rusak baik berat maupun ringan, sedangkan dari 371 ruang kelas belajar pada SD Swasta sebanyak 9,61 % mengalami rusak berat dan ringan. Sedangkan dari 217 ruang kelas belajar pada MI, sebanyak 33 % kondisinya rusak berat dan ringan.

Pencapaian APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan yaitu dari 94,90 % menjadi 101,17 % dan APM dari 71,22 % menjadi 75,10 %. Faktor utama penyebab meningkatnya APK dan APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan.

Jumlah SMP Negeri mengalami peningkatan dari 17 menjadi 19 pada tahun 2005 dengan jumlah ruang belajar dari 337 kelas menjadi 369 kelas, jumlah rombongan belajar dari 278 menjadi 407 rombel, jumlah guru dari 2.077 orang menjadi 2.499 orang dan jumlah murid dari 36.506 siswa menjadi 51.243 siswa, sedangkan jumlah SMP swasta sebanyak 77 unit dengan jumlah guru 1.742 orang dan jumlah murid 23.673 siswa.

Jumlah MTs Negeri dan MTs swasta mengalami penurunan dari 31 menjadi 30 pada tahun 2005, tetapi dari jumlah murid mengalami peningkatan yaitu dari 5.333 menjadi 5.676 siswa, jumlah guru 414 orang menjadi 593 orang.

Walaupun APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs cenderung telah mencapai diatas 100 %, ini bukan berarti bahwa penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan sederajat di Kota Bogor telah semuanya mengakses pendidikan pada tingkat tersebut, karena secara nyata masih terdapat peserta didik yang putus sekolah. Pada tahun pelajaran 2004/2005 angka putus sekolah jenjang SMP dan yang sederajat tercatat sejumlah 328 siswa (SMP Negeri sebanyak 49 siswa, SMP Swasta sebanyak 208 siswa, dan MTs sebanyak 71 siswa).

Tahun 2005 jumlah guru SMP dan MTs yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulus S-1 sebanyak 76,62 %, dengan rincian guru SMP Negeri yang belum memiliki kualifikasi yang disyaratkan sebesar 24,40 %, guru SMP Swasta sebesar 23,79 %, dan pada guru MTs sebesar 28,43 %.

Secara kualitas, fasilitas layanan pendidikan masih belum memadai. Pada tahun 2005 dari sejumlah 369 ruang kelas belajar pada SMP Negeri, sekitar 27,10 % mengalami rusak berat dan ringan dari 640 ruang kelas belajar pada SMP Swasta, 14,87 % mengalami rusak berat dan ringan, Sedangkan dari sejumlah 133 ruang kelas belajar pada MTs sebanyak 20,49 % kondisinya rusak berat dan ringan .

Pencapaian APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2005 adalah 109,38 % dan APM sebesar 77,48 %. Faktor utama penyebab tingginya APK dan APM pada pendidikan SMA, SMK dan MA adalah meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan partisipasi masyarakat. dalam kurun waktu 10 tahun jumlah sekolah SMA Negeri mengalami peningkatan dari 8 menjadi 10 dengan jumlah ruang belajar dari 655 kelas menjadi 660 kelas. Jumlah SMA Swasta dari 40 menjadi 38 dengan jumlah kelas dari 372 kelas menjadi 421 kelas dan jumlah rombongan belajar dari 298 menjadi 445 rombel, jumlah guru dari 704 orang menjadi 1.043 orang, dan jumlah murid dari 14.610 siswa menjadi 14.674 siswa.

SMK Negeri tidak mengalami penambahan sekolah yaitu tetap 3. Namun untuk ruang belajar meningkat dari 58 kelas menjadi 64 kelas, tetapi jumlah guru dari 287 orang turun menjadi 246 orang, dan jumlah murid dari 2.765 siswa menjadi 3.096 siswa. Sedangkan jumlah SMK Swasta dari 45 buah menjadi 54 buah dengan jumlah ruang belajar dari 408 kelas menjadi

562 kelas, jumlah guru dari 938 orang menjadi 1.580 orang, dengan jumlah murid dari 19.373 siswa menjadi 23.370 siswa.

Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 unit dan Swasta meningkat 8 unit menjadi 13 unit dengan jumlah ruang belajar MA Negeri dan MA Swasta dari 45 kelas pada tahun 1996 menjadi 78 kelas pada tahun 2005 dengan jumlah rombongan belajar dari 57 menjadi 78 rombel, jumlah murid dari 2.716 siswa menjadi 2.374 siswa, dan jumlah guru dari 260 orang menjadi 296 orang.

Pada tahun pelajaran 2004/2005 angka putus sekolah tercatat 455 siswa (SMA Negeri sebanyak 1 siswa; SMA Swasta sebanyak 119 siswa; SMK Swasta sebanyak 298 siswa; dan MA sebanyak 37 siswa). Demikian pula secara kualitas pendidikan pada tingkat SMA, SMK, dan MA belum memuaskan, karena ketersediaan pendidik secara kualitas belum sepenuhnya memadai. Tahun 2005 menunjukkan jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulus S1. Untuk guru SMA Negeri yang belum memiliki kualifikasi yang disyaratkan sebesar 9,25 %, guru SMA Swasta sebesar 10,83 %. Sedangkan pada guru SMK Negeri sebesar 22,59 % dan guru SMK Swasta sebesar 1,06 %. Sementara pada guru MA Swasta sebesar 30,59 %.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia, selain melalui pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, SMA/SMK/MA juga dilaksanakan melalui pendidikan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khusus, tetapi sampai saat ini jumlah pendidikan Luar Biasa di Kota Bogor jumlahnya belum memenuhi kebutuhan, misalnya TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan sebagainya.

Pendidikan Non Formal (PNF) adalah merupakan pendidikan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak / belum memperoleh pelayanan pendidikan melalui jalur formal. Kegiatan pokok PNF terdiri dari penuntasan buta aksara, kegiatan kelompok belajar (Kejar) Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dalam rangka mendukung program Wajar Dikdas serta Kegiatan Paket C untuk setara SMA dan lembaga pendidikan kursus / lembaga pelatihan kerja serta Madrasah Diniyah serta Salafiyah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan selama tahun 1996 - 2005 jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara Kejar Paket A, B dan C dari 2 buah meningkat menjadi 25 buah dengan jumlah Tutor dari 180 orang menjadi 480 orang. Jumlah warga belajar yang mengikuti Kejar Paket A sebanyak 2.080 WB dan telah lulus ujian sebanyak 436 WB. Sedangkan jumlah warga belajar yang mengikuti Kejar Paket B

Setara SMP sebanyak 10.880 WB dan telah lulus ujian sebanyak 1.359 WB, jumlah warga belajar yang mengikuti Kejar Paket C Setara SMA sebanyak 1.899 WB dan telah lulus ujian sebanyak 1.152 WB. Namun demikian, rasio kelulusan PKBM di kota Bogor meskipun meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih dirasakan belum optimal.

B. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Kota Bogor selama periode sepuluh tahun (1996-2005) telah menunjukkan situasi yang relatif baik seperti angka kematian bayi (AKB) menurun dari 35,70 perseribu kelahiran hidup menjadi 26,64 perseribu kelahiran hidup. Sedangkan untuk angka kematian balita (AKABA) dan angka kematian ibu (AKI) tidak bisa dihitung karena belum disurvei sehingga belum mencerminkan situasi yang sebenarnya, namun jumlah kematian balita berdasarkan data yang dilaporkan pada tahun 2000-2005 tercatat sebanyak 98 anak dan kematian ibu sebanyak 49 orang. Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita telah menurun, yaitu *prevalensi* gizi kurang dari 12,90 % menjadi 9,20 % dan gizi buruk dari 1,42 % menjadi 0,42 %.

Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Bogor pada tahun 2005 mencapai 71,80 tahun, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya mencapai 67,7 tahun. Hal ini menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan warga Kota Bogor. Kenaikan ini membuat indeks kesehatan sebagai salah satu indikator pembangunan manusia turut meningkat dari 71,37 % pada tahun 2000 menjadi 78 % pada tahun 2005

Faktor penyebab kematian bayi yang paling banyak disebabkan oleh penyakit Asphyxia, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Disamping itu masih ada sekitar 15 % ibu yang melahirkan dibantu oleh bukan tenaga kesehatan sehingga beresiko kepada bayi.

Faktor penyebab kematian anak balita disebabkan oleh penyakit diare dan pneumonia. Kasus penyakit diare dan penyakit pneumonia pada anak balita telah menyebabkan kematian sejumlah 98 anak. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit diare masih merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan di Kota Bogor.

Faktor penyebab kematian ibu melahirkan sebagian besar disebabkan oleh eklamsia berat dan reupta uteri sebanyak 29 orang. Hal ini mencerminkan bahwa kematian ibu disebabkan oleh ANC (*ante natal care*) yang belum optimal (kasus eklamsia 15 orang) dan pertolongan persalinan yang kurang memadai (reupta uteri 14 orang) dan rujukan. Dengan

demikian, bahwa faktor penyebab kematian ibu melahirkan adalah disebabkan oleh pertolongan persalinan dan pemeriksaan kehamilan yang masih rendah.

Pada tahun 2005 persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai 77,80 %, dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 73,40 % dan saluran pembuangan limbah relatif masih rendah yaitu sebesar 25 %. Dengan demikian menggambarkan bahwa kesehatan lingkungan yang merupakan kegiatan lintas sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan yang baik.

Cakupan partisipasi masyarakat terhadap Posyandu masih rendah yaitu rata-rata setiap tahunnya masih dibawah 70 % (68,5 %).

Jumlah Posyandu sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan mengalami peningkatan yaitu dari 820 buah menjadi 870 buah dengan jumlah kader dari 3.772 orang menjadi 4.028 orang, sehingga proporsi kader per Posyandu rata-rata sejumlah 4-5 orang serta proporsi balita per Posyandu sebanyak 86 balita. Secara kualitas perkembangan Posyandu ditinjau dari 4 klasifikasi kemandirian Posyandu. Pada tahun 2005, berdasarkan hasil analisa yang masih tergolong strata Pratama sebesar 32,37 %. Sedangkan Posyandu yang tergolong strata Madya 49,36 % dan pada tingkat strata Purnama dan Mandiri telah mencapai sebesar 18,27 %.

Jumlah Rumah Sakit Umum sebagai sarana kesehatan masyarakat meningkat dari 5 buah menjadi 9 buah, pada tahun 2005, balai pengobatan berjumlah 83 buah, rumah bersalin 9 buah, dan laboratorium 19 buah. Sedangkan jumlah Puskesmas 45 buah terdiri dari puskesmas perawatan dan induk 24 buah serta puskesmas pembantu 21 buah. Jumlah apotik dan toko obat masing-masing 97 buah dan 28 buah.

Pelayanan Puskesmas pada tahun 2005 sudah cukup tinggi yaitu rata-rata setiap Puskesmas dapat melayani sekitar 18.450 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan pelayanan kesehatan lebih baik bila dibandingkan dengan standar Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Sementara itu jumlah seluruh tempat tidur (TT) di Rumah Sakit sebanyak 1.429 TT atau rata-rata dapat melayani 100.000 penduduk. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2005, jumlah dokter umum sebanyak 398 orang, dokter gigi sebanyak 183 orang, dokter spesialis sebanyak 266 orang, dan bidan sebanyak 354 orang.

Pembiayaan kesehatan sampai saat ini baru dapat melayani sekitar 30 % dari jumlah penduduk Kota Bogor, sedangkan pembiayaan kesehatan Gakin sampai saat ini sudah mencapai 100 % yang dibiayai oleh Pemerintah

Penyebaran pelayanan kesehatan belum merata dengan persediaan tempat tidur hanya sebanyak 849 buah dari 9 rumah sakit, sehingga perbandingan antara tempat tidur dengan pasien belum mencukupi.

Masyarakat yang mempunyai jamban baru 60 % dan masyarakat yang melaksanakan pengelolaan komunal sebanyak 68 %, sehingga penataan lingkungan yang sehat sampai saat ini belum maksimal.

Kesadaran akan perilaku hidup sehat yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pembasmian bebas jentik diseluruh rumah penduduk baru 92,5 % dari target 95 %, dari segi kebugaran masyarakat Kota Bogor baru 30 %, masyarakat yang masih merokok sebanyak 61,5 %, yang menggunakan Narkoba sebanyak 194 kasus, masih adanya gizi buruk sebanyak 0,4 % dan masih adanya makanan yang belum aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Sampai saat ini Pelayanan Kesehatan terutama bagi ibu hamil baru mencapai 90 %, linakes 80 %, 80 neonatus, 60 % balita, 19,1 % lansia, terselenggaranya imunisasi dasar yang lengkap bagi bayi dan PUS sebanyak 89,9 %, Pelayanan KB bagi askesptor remaja sebanyak 70 %, Pelayanan UKS konselening remaja sebanyak 100 % untuk tingkat SD dan 60 % untuk tingkat SMP/SMA. Pemberantasan penyakit menular: 27 kasus filariasis, 1137 kasus DBD, persentase angka penemuan kesembuhan TB 88 % dan HIV /AIDS 194 kasus.

C. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Selama kurun waktu tahun 1996-2005 pelayanan keluarga berencana telah berhasil menurunkan angka kelahiran bayi (CBR) dari 17,94 % menjadi 12 %, sehingga rata-rata jumlah anak yang dilahirkan (TFR) menurun dari 1,70 menjadi 1,68. Pencapaian peserta KB Baru selama tahun 1996-2005 rata-rata setiap tahunnya sekitar sebesar 15 % dan pencapaian KB Aktif rata-rata setiap tahunnya sebesar 75 % dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Dalam rangka memberdayakan keluarga dan meningkatkan ketahanan keluarga telah terbentuk kelompok bina keluarga seperti BKB, BKR, dan BKB sejak tahun 2000, Jumlah BKB atau Bina Keluarga Balita (pembinaan dan pemantauan keluarga yang mempunyai balita) dari mulai terbentuk sebanyak 45 unit pada tahun 2003 kemudian menurun menjadi 6 unit pada tahun 2005.

D. Kepemudaan Dan Olah Raga

Pencapaian pembangunan pemuda ditandai dengan meningkatnya aktifitas pemuda dalam berbagai pembangunan melalui pengerahan pemuda terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan. Sedangkan pencapaian pembangunan olahraga ditandai dengan meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan semaraknya kegiatan olahraga di masyarakat seperti kegiatan kesegaran jasmani daerah yang didukung dengan sarana olahraga yang memadai.

Pemberdayaan generasi muda dalam mengisi pembangunan di Kota Bogor selama kurun waktu sepuluh tahun telah menunjukkan peningkatan, yaitu dengan meningkatnya aktifitas dan peran serta generasi muda dalam berbagai bidang pembangunan. Secara umum pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Bogor selama kurun waktu sepuluh tahun telah mengalami peningkatan yang ditandai oleh dua hal yaitu peningkatan pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga.

E. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama tahun 1996-2005 di Kota Bogor memperlihatkan kondisi yang belum menggembirakan terutama bagi masalah penyandang masalah sosial.

Untuk menangani berbagai masalah sosial yang berkembang telah didukung oleh 136 orang pekerja sosial masyarakat untuk menata kemampuan penyandang masalah sosial.

F. Agama

Bentuk pembinaan terhadap kerukunan umat beragama di Kota Bogor adalah memberikan alternatif fasilitas dan aktifitas masyarakat sehari-hari dengan nuansa nilai-nilai kegamaan. Pemerintah peranannya tidak masuk ke dalam substansi agama, melainkan sebagai fasilitator, mediator dan stimulator, serta memberikan rasa nyaman, aman, dan kemudahan setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya. Sedangkan substansi agama sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat itu sendiri.

Jumlah tempat peribadatan meningkat hampir pada semua agama baik itu jumlah mesjid, gereja maupun pura dan vihara. Jumlah pemeluk agama islam sejumlah 92,17 %, pemeluk agama protestan sejumlah 3,22 %, agama khatolik sejumlah 3,09 %, agama hindu 0,44 %, dan agama budha sebesar 1,08 %. Untuk mempermudah penyampaian pelayanan bimbingan keagamaan kepada masyarakat didukung oleh sejumlah tokoh agama, seperti alim ulama, mubaligh, dan penyuluh agama. Pada tahun 2005 jumlah alim

ulama sebanyak 641 orang, mubaligh sebanyak 221 orang, khotib sebanyak 1.096 orang, penyuluh agama islam sebanyak 150 orang, penyuluh agama kristen 2 orang, dan penyuluh agama khatolik sebanyak 1 orang. Selain itu peran partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama terdapat 25 organisasi agama islam.

Masyarakat yang menunaikan ibadah haji setiap tahun jumlahnya bervariasi antara 900 orang sampai dengan 1.500 orang.

Melalui pembangunan kegamaan yang terpadu dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat mandiri, berkualitas, sehat jasmani-rohani dan tercukupinya kebutuhan material-spiritual.

G. Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Selama kurun waktu 1996-2005 pembangunan kesenian kebudayaan yang dilakukan diarahkan untuk membina, mengembangkan dan melindungi kesenian dan kebudayaan daerah. Dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan di Kota Bogor pada tahun 2005 terdapat 30 buah sanggar seni dengan jenis kesenian daerah terdiri dari seni karawitan, seni tari, teater, seni rupa dan padalangan. Sedangkan 2 buah kebudayaan yaitu kecapi jenaka dan pantun beton. Sementara itu, terdapat 8 buah benda cagar budaya peninggalan sejarah seperti prasasti batutulis, makam, mesjid keramat, situs dan perabot rumah tangga.

H. Peranan Perempuan

Guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui peningkatan pemberdayaan keluarga (PKK) yang dapat menurunkan tingkat kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang ditandai dengan meningkatnya peranan perempuan dalam membantu keluarga.

Pada saat ini peran perempuan selain berpartisipasi dalam pembangunan, juga ikut berpartisipasi dalam peningkatan pengokohan institusi keluarga, peningkatan peran sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan nyaman, serta peningkatan dalam bidang politik walaupun hasilnya belum maksimal.

2.1.4. Hukum, Pemerintahan dan Politik

A. Hukum

Penegakan hukum di Kota Bogor dari tahun ke tahun berjalan ke arah yang lebih baik, akan tetapi peran dan fungsinya belum berjalan secara maksimal. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih adanya warga masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan daerah yang berlaku, seperti pelanggaran atas pemanfaatan tanah, pemanfaatan air bawah tanah tanpa ijin, rendahnya disiplin berlalu lintas, penyalahgunaan ruangan publik untuk kepentingan individu, dan pembuangan sampah secara liar, serta belum efektifnya regulasi dan efisiensi terutama dalam hal perizinan.

Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam kurun waktu 2000-2005 adalah sebanyak 81 buah, yang terdiri dari Perda APBD, Perda Pajak, Perda Retribusi, Perda Kelembagaan, dan Perda pengaturan yang bersifat umum.

B. Pemerintahan

Pemerintah Kota Bogor telah menjalankan kewenangan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu menjalankan fungsi desentralisasi dan menjalankan urusan wajib maupun urusan pilihan, namun pelaksanaan UU tersebut belum secara optimal dilakukan karena pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah kabupaten/kota masih tumpang tindih, pelimpahan kewenangan belum sejalan dengan pelimpahan pendanaan sebab pendanaan pembangunan masih didominasi Pemerintah Pusat. Salah satu kendala yaitu masih rendahnya Catur Tertib pertanahan di Kota Bogor, karena untuk urusan pertanahan sendiri menjadi semakin lemah setelah adanya peraturan yang baru tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan bahwa BPN tidak dalam pengawasan DPRD. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi secara vertikal antara Pusat dan Provinsi, terutama dalam melaksanakan program, baik Pusat maupun Provinsi, sedangkan koordinasi horisontal dengan DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, Kodim 0606 Kota Bogor, Pengadilan Negeri Bogor dan instansi-instansi vertikal yang ada di Kota Bogor berjalan sinergi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu diperlukan kerjasama vertikal dan horisontal dengan lembaga dan instansi pemerintah lainnya, terdapat juga kerjasama daerah yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ke 3 dan kerjasama dengan Luar Negeri.

Untuk menguatkan peran kelembagaan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Setiap kewenangan diinventarisasi sesuai dengan potensi dan kondisi daerah Kota Bogor yang selanjutnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai bidang tugas masing-masing. Penataan kelembagaan yang dilakukan lebih menyetengahkan aspek penggabungan berbagai organisasi kecil yang mempunyai karakter pekerjaan sejenis menjadi suatu organisasi yang lebih besar dan kompak, dan mengakomodir adanya penggabungan antara induk organisasi yang telah ada dengan berbagai instansi vertikal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Struktur organisasi Pemerintah Kota Bogor terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 11 (sebelas) Dinas, 4 (empat) Badan, 4 (empat) Kantor, 1 (satu) Satuan, 6 (enam) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) Kelurahan.

Pemerintah Kota Bogor terus melakukan reformasi birokrasi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah aparat di pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setiap kelembagaan yang terbentuk ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas untuk tiap bidang pada struktur organisasi. Namun demikian belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Standar Operasi Pelayanan (SOP).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, Pemerintah Kota Bogor dengan kondisi Maret 2005 mempunyai pegawai sebanyak 10.234 orang yang terbagi antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 8.369 orang yang terdiri dari Golongan IV 2.915 orang, Golongan III 3.967 orang, Golongan II 1.239 orang, dan Golongan I 248 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 831.571 Jiwa maka rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk adalah 1 : 82, artinya bahwa jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah terpenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tata Usaha. Kedepannya tetap perlu diupayakan peningkatan produktivitas, serta peningkatan standar hidup PNS agar sesuai dengan tuntutan kerja serta tuntutan profesionalisme PNS.

C. Politik

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 yang diikuti oleh 414.925 orang pemilih (KPU, 2005). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum lebih dari 80% tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam moment politik sangat tinggi. Melalui pemilu tahun 2004, masyarakat Kota Bogor telah memilih 45 orang wakil-wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rincian: 11 orang dari Golkar, 10 orang dari PKS, 8 orang dari PDIP, 5 orang dari PAN, 5 orang dari Partai Demokrat, 5 orang dari PPP, 1 orang dari PDS. Pemilihan presiden tahap pertama diikuti oleh 441.981 orang dan tahap kedua diikuti 428.423 orang pemilih.

Untuk perkembangan Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Partai Politik (Parpol) di Kota Bogor dilihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan Ormas, LSM dan Parpol secara kualitas dapat meningkatkan pembangunan masyarakat di Kota Bogor. Kontribusi yang nyata dalam kegiatan sosial diantaranya pemberian santunan kepada keluarga/anak kurang mampu, kegiatan sunatan massal, pengobatan gratis bagi gakin dan lain-lain serta ikut serta dalam gerakan pengelolaan sampah dan budaya bersih.

Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, artinya telah berjalan ke arah yang lebih baik melalui berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses musyawarah untuk mencapai hasil yang diharapkan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dilakukan dengan memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga kondisinya semakin membaik dari tahun ke tahun. Dalam jumlah, perkembangan koperasi di Kota Bogor terus meningkat. Dari sejumlah 260 koperasi tahun 1996 menjadi 695 buah pada tahun 2005 yang tersebar di enam Kecamatan. Demikian pula, jumlah unit usaha kecil dan menengah di Kota Bogor meningkat dari tahun ke tahun, dari 1503 unit pada tahun 1996 menjadi 3.043 unit pada tahun 2005, yang dibagi menjadi industri pertanian dan non pertanian.

Selain pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), masyarakat Kota Bogor juga memperoleh bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan dari *The World Bank*, berupa hibah

yang dikelola secara bergulir di lembaga-lembaga keuangan mikro di setiap kelurahan di wilayah kota Bogor. Pada awal mulai bergulirnya dana P2KP, di Kota Bogor pada tahun 1999 terdapat 45 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 45 Kelurahan. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 68 BKM di 68 kelurahan pada tahun 2005. Jumlah ini menjadikan tiap Kelurahan di Kota Bogor memiliki BKM. Kategori-kategori BKM itu sendiri dari hasil penilaian terdapat 19 BKM yang masuk dalam kriteria A (kategori baik), 29 BKM masuk katagori B (kategori sedang) dan 20 BKM masuk katagori C (kategori kurang), dengan demikian bahwa Program P2KP di Kota Bogor sampai saat ini sekitar 27,94 % BKM berjalan baik, 42,64 % BKM berjalan sedang, dan 29,41 % BKM berjalan kurang baik.

Dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kota Bogor telah menggulirkan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sejak tahun 2003. Sejak tahun 2003 ada peningkatan dari aspek output dan partisipasi masyarakatnya. Dari hasil pemberian dana stimulan kegiatan PPMK ini, jumlah swadaya masyarakat cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 185 % tahun 2003 menjadi 200 % pada tahun 2005.

Untuk isu kesetaraan gender, penempatan perempuan dalam pemerintahan dan politik masih rendah hal ini ditunjukkan oleh jumlah perempuan dalam pemerintahan maupun legislatif belum sesuai dengan semangat kesetaraan gender yang dapat terlihat pada Data Indeks Pembangunan Gender 51,1 (index kesetaraan gender :ikg di Kota Bogor) masih rendah. Dibuktikan dalam bidang politik perempuan selama ini hanya menjadi objek pengumpul suara. Saat ini perempuan dalam proses pembelajaran dalam kesadaran politik. Didukung dengan adanya Undang Undang yang mengharuskan parpol memiliki 30 % wanita.

2.2. TANTANGAN/ISU STRATEGIS

2.2.1. Fisik dan Prasarana

A. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dihadapkan pada persaingan yang semakin tinggi di masa depan. Penguasaan terhadap iptek diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kota dalam berbagai hal. Kontribusi iptek diharapkan dapat meningkatkan layanan kependudukan, perijinan, kesehatan dasar, energi, dan pangan. Selain itu perlu ditingkatkan pengembangan budaya

iptek ditengah masyarakat kota agar semakin banyak jumlah ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang menguasai iptek. Penguasaan iptek juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap degradasi fungsi lingkungan dan mengantisipasi serta menanggulangi bencana.

B. Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Tantangan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Antisipasi tersebut antara lain adalah perlu dilakukan pendekatan terhadap pola kehidupan masyarakat, yang dikaitkan dengan besarnya sumbangan pencemaran air dan tanah oleh kegiatan domestik; dan pendekatan mengedepankan peran aktif masyarakat yang diharapkan akan berdampak pada kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan.

Dalam upaya pencegahan degradasi lingkungan dimasa depan perlu dilakukan peningkatan kuantitas resapan limpahan air permukaan dalam upaya mengembalikan kandungan air tanah dan mengendalikan daya tampung sungai seiring dengan meningkatnya luas lahan terbangun. Selain itu perlu mengembalikan fungsi konservasi kawasan bantaran sungai, perlindungan mata air, sumur resapan dan pengalokasian ruang terbuka hijau kota, disamping perlu secara bertahap dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

Ketersediaan lahan mencapai batas kritis pada tahun 2026. Hal ini dapat terjadi jika instrumen pengendalian pembangunan berkelanjutan tidak berjalan. Dengan pola penggunaan lahan seperti saat ini, dan ditambah pola konsumsi air di kota Bogor, maka terdapat defisit air sebesar 1,7 juta m³/tahun. Untuk menihilkan defisit air, dibutuhkan luas hutan kota seluas 1.514,78 ha atau 12,78% dari luasan kota.

Permasalahan lain yang penting untuk diselesaikan adalah adanya sistem mitigasi bencana. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana harus ditangani secara terpadu, terlebih pada wilayah yang padat penduduk. Hal ini terkait antisipasi jatuhnya korban jiwa. Pengamanan terhadap wilayah daerah aliran sungai perlu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah antisipasi terhadap kerawanan bencana harus direncanakan oleh lembaga terkait dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

Tantangan lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Keberlanjutan pembangunan pada jangka panjang juga akan menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan warga kota. Keterlibatan Kota Bogor dalam forum dunia *International Council for Local Environmental Initiatives* (ICLEI) tentang penanganan masalah ini harus menghasilkan langkah-langkah strategis dan program-program yang menyentuh terhadap perubahan kondisi kearah yang lebih baik. Program yang sudah berjalan hendaknya terus dilanjutkan dan senantiasa berusaha mencari terobosan-terobosan baru untuk penanganan masalah ini. Hal-hal tersebut menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Kota Bogor.

C. Wilayah dan Tata Ruang

Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan setiap wilayah kota.

Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang menjadi semakin terbatas. Selain itu terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi tata ruang di kota Bogor yaitu fenomena *urban sprawl* (pembangunan kota yang menyebar sehingga kepadatannya rendah dan tidak terpadu) di kota-kota sekelilingnya terutama Jakarta.

Fenomena *urban sprawl* akan menyebabkan kota menjadi tidak terpadu dan tidak efisien diantaranya dikarenakan penggunaan lahan yang begitu besar untuk mendukung kepadatan yang relatif rendah, jarak tempuh perjalanan yang semakin jauh, dan penyediaan utilitas pada wilayah yang menyebar. Penataan ruang untuk selanjutnya perlu diarahkan sehingga mendukung pembangunan kota yang terpadu dengan kepadatan yang memadai sehingga efisien dan mendukung keberlanjutan.

Penegasan terhadap penataan batas wilayah perlu didukung oleh kajian dan sinkronisasi dengan wilayah-wilayah sekitar. Penataan batas diperlukan guna mendapatkan cakupan wilayah yang pasti dan legal. Selain itu, untuk memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administratif maupun sarana prasarana pendukung.

Proses perencanaan ruang kedepan tetap memerlukan kajian mendalam terhadap kondisi eksternal yang berkembang dan regulasi-regulasi yang mengikat baik dari tingkat Provinsi maupun nasional. Hal ini untuk menghindari benturan kebijakan yang terkait dengan pengaturan pola ruang. Proses perencanaan lainnya yang harus diperhatikan pada masa depan adalah penetapan kawasan-kawasan strategis yang didasarkan pada potensi wilayah, kriteria dan penilaian yang disepakati secara bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini terkait dengan usaha membuka peluang-peluang investasi di Kota Bogor dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan aspek sosial budaya (kawasan cagar budaya), dan kelestarian lingkungan.

Dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 sebanyak 1,5 juta jiwa, maka diperkirakan luas perumahan dan permukiman pada tahun 2025 bertambah menjadi 6.659,7 Ha atau 56,2 % dari luas wilayah saat ini. Oleh karena itu perencanaan tata ruang kota selalu memprioritaskan identifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan, seperti kawasan lindung serta kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana, baik banjir, longsor, maupun bencana lainnya.

Kawasan-kawasan tersebut harus dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak terbangun. Tantangan kedepan adalah penyediaan RTH pada skala Kota Bogor sebanyak 30% dari luas keseluruhan kota. Tentunya hal tersebut tidak hanya mengacu terhadap besaran yang harus dipenuhi saja, namun juga mengarahkan pada pola distribusi sebaran RTH yang merata di setiap wilayah, diukur dari tingkat kebutuhan terhadap fungsi dan manfaat RTH.

Perlu dibuka ruang-ruang peningkatan kualitas peran aktif masyarakat yang lebih besar dalam penyusunan tata ruang maupun peraturan zonasi yang lebih mendalam, agar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan optimal.

D. Transportasi

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena curah hujan di Kota Bogor yang tinggi. Selain itu, perlu peningkatan fungsi pengawasan terhadap kualitas pekerjaan serta kualitas konstruksi jalan sehingga pembangunan jalan dapat sesuai dengan perencanaan dan umur teknis jalan. Usaha-usaha perencanaan jalan dalam upaya mencari berbagai alternatif akses jalan perlu terus dilanjutkan. Perkembangan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap mobilitas yang tinggi, dan peningkatan jumlah bangkitan, yang harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas jaringan jalan, khususnya di kawasan pengembangan perumahan.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi pada masa 20 tahun yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi kota yang efisien, efektif, terjangkau, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antar moda serta selaras dengan pengembangan wilayah dan perwujudan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat kota. Selain itu perlu meningkatkan pelayanan transportasi publik dalam kota yang bersifat massal, terintegrasi, terjangkau, tersebar, aman, dan nyaman, melalui transportasi massal lintas Bogor Raya yang melayani Kota Bogor dan wilayah-wilayah sekitarnya. Hal tersebut didukung oleh peningkatan prasarana jalan yang memadai baik pengembangan daya tampung maupun pengembangan jalan alternatif di dalam kota. Pengembangan jaringan jalan di wilayah perbatasan serta penataan pola pergerakan orang dan barang serta rute angkutan umum agar dapat menurunkan beban lalu lintas di pusat kota. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia pengelola layanan transportasi publik.

E. Sarana, Prasarana dan Utilitas Kota

Tantangan utama yang dihadapi sektor energi seperti listrik dan gas adalah meningkatkan pasokan energi. Peningkatan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang perlu diantisipasi dengan peningkatan dan pengembangan sumber-sumber daya energi tersebut. Jika dimungkinkan dengan memanfaatkan iptek diusahakan sumber-sumber energi alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat kota. Pada sektor telekomunikasi, pada masa depan diperlukan pengendalian dan penataan sarana dan prasarana telekomunikasi. Salah satu diantaranya seperti menara/tower yang berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang agar tetap memperhatikan nilai estetika, keselamatan, dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan serta efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Untuk pemenuhan air bersih, peningkatan pemanfaatan sumber-sumber air baku baru agar memenuhi peningkatan produksi air bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan. Inventarisasi sumber-sumber air sangat diperlukan, yang dibarengi dengan upaya perlindungan untuk mempertahankan kandungan air tanah melalui upaya konservasi dan sumur resapan. Perluasan cakupan konsumen air bersih yang tidak terlayani jaringan PDAM diupayakan melalui penyediaan jaringan air bersih komunal non PDAM berbasis partisipasi masyarakat. Selain peningkatan kuantitas baik produksi maupun konsumen, pada tahun 2026 peningkatan kualitas air bersih menjadi air bersih siap minum untuk rumah tangga mutlak diperlukan. Semua itu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan untuk dapat terjangkau oleh masyarakat melalui kemudahan dan mendekatkan layanan kepada konsumen.

Pengembangan seluruh sistem jaringan utilitas kota pada masa depan diarahkan kepada sistem terpadu dengan konstruksi ducting system. Sistem ini akan meningkatkan keamanan jaringan utilitas dan masyarakat serta meningkatkan kualitas estetika kota.

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kota antara lain ; (a) mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; (b) melakukan perubahan terhadap sistem dan biaya perijinan daerah sebagai upaya menekan dan mengurangi harga rumah sehingga meningkatkan daya beli masyarakat; (c) pola pembangunan rumah yang vertikal bagi masyarakat sebagai antisipatisi terhadap keterbatasan lahan dan harga lahan yang semakin tinggi; (d) perbaiki kondisi bantaran sungai dengan merivitalisasi kawasan bantaran atau merelokasi permukiman yang

saat ini sudah tumbuh dan berkembang; (e) pengalokasian kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun untuk permukiman maupun pusat perdagangan dan jasa yang bekerjasama antara pemerintah kota dengan sektor swasta; (f) Mengendalikan kelestarian lingkungan pada kawasan perumahan baru yang mencakup penyediaan sumur resapan air, ruang terbuka hijau, pemanfaatan air tanah, kelengkapan fasos fasum, tempat pembuangan sampah sementara serta pengolahan limbah rumah tangga secara komunal; (g) melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan melalui berbagai fasilitas yang diberikan seperti kredit mikro dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Melalui mekanisme seperti ini diharapkan pada masa depan penyediaan perumahan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Di pusat Kota dengan jumlah penduduk yang padat dan kompleksnya kegiatan, akan lebih banyak dan luas tingkat keberadaan RTH, disamping wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana longsor dan banjir. Di masa depan, diharapkan sudah tersedia kajian dan pengaturan RTH kota dalam bentuk Masterplan RTH. Selain itu kawasan-kawasan budaya peninggalan masa lalu baik berupa bangunan maupun situs perlu dilestarikan.

Pengelolaan sampah selama 25 tahun ke depan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat baik dari sumbernya (rumah tangga dan kegiatan ekonomi kota) sampai pemanfaatan sebagai nilai ekonomi kota seperti kompos maupun material daur ulang, selain didukung oleh peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang baik tingkat lingkungan maupun tingkat kota. Untuk itu upaya nyata kemitraan dan pembinaan terhadap masyarakat baik rumah tangga maupun swasta dilakukan dengan prinsip kemudahan dan keberlanjutan. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diharapkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (*sanitary landfill*) untuk mencegah dampak lingkungan dan dampak sosial yang negatif.

Pengembangan sarana dan prasarana interaksi sosial berupa ruang-ruang publik yang berbentuk tempat rekreasi, wisata, dan hiburan dengan memperhatikan nilai, norma, dan aturan agama untuk meningkatkan kualitas sosial masyarakat maupun daya tarik wisata Kota Bogor. Beberapa potensi objek-objek wisata terutama yang menunjang pendidikan perlu dikembangkan lebih maju. Selain itu perlu peningkatan taman-taman bacaan dan perpustakaan di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat.

2.2.2. Ekonomi

Kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir digunakan sebagai tolok ukur dalam memproyeksi indikator makro ekonomi sebagai berikut:

1. Produk Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 12.486.264,53 juta dengan rata-rata laju pertumbuhan sampai tahun 2025 sebesar 6,49 % serta PDRB per Kapita sebesar Rp. 8.350.649,78.
2. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB kota Bogor tahun 2025 adalah : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 6,52% yang di dalamnya terdiri dari : (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,93% dan (b) Dana Perimbangan sebesar 5,59% .
3. Proporsi PAD terhadap APBD diharapkan meningkat menjadi 14.25 % per tahun hingga tahun 2025.
4. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor tahun 2025 diprediksikan akan mencapai 86,85 dengan Indeks Pendidikan sebesar 92,91, Indeks Kesehatan 88 dan Indeks Daya Beli 74,12. Gambaran Struktur Perekonomian Kota Bogor di 20 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

A. Sektor Primer

Perkembangan Sektor Primer di 20 tahun yang akan datang akan semakin kecil kontribusinya terhadap PDRB Kota Bogor yakni sekitar 0,33% tahun 2010, 0,31% tahun 2015, 0,29% tahun 2020 dan 0,26 % di tahun 2025. Hal ini termasuk logis disebabkan oleh semakin menyempitnya lahan pertanian. Tantangan di sektor primer adalah meningkatkan produksi dengan luas lahan yang terbatas (intensifikasi lahan), meningkatkan nilai tambah (added value) dan daya saing produk pertanian. Rendahnya nilai tambah sektor pertanian, menuntut suatu upaya peningkatan industri hilir sistem agribisnis, sehingga dapat menghasilkan produk akhir pertanian yang berkualitas yang berdaya saing. Tantangan dalam pengembangan subsistem pemasaran (On-farm agribisnis) yang dapat menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem informasi serta pendayagunaan dan penciptaan pasar dalam negeri. Mengembangkan subsistem Jasa Penunjang (Supporting Institution) sehingga dapat mendukung peningkatan produk pertanian terutama bagi komoditi yang menjadi komoditas ekspor seperti ikan hias.

1. **Pertanian**, Diperkirakan pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan, di Kota Bogor di masa depan akan menghadapi masalah utama berupa lahan yang semakin menyempit seiring dengan perkembangan Kota Bogor. Hal ini terlihat dari kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB yang terus menurun, yaitu 0.2113 % pada tahun 2010, 0,2085 % tahun 2015, 0,2036 % tahun 2020 dan 0,1966 % tahun 2025.
 - a. Hal yang sama juga terjadi pada **sub sektor perkebunan**. Kontribusinya semakin menurun, yaitu 0,00043% pada tahun 2010, 0,00040 % tahun 2015, 0,00037 % tahun 2020 dan 0,00034 % tahun 2025.
 - b. **Sub sektor Pengusahaan ternak** kontribusinya juga terus turun, yaitu 0,0788 % pada tahun 2010, 0,0670 % tahun 2015, 0,0564 % tahun 2020 dan 0,0470 % tahun 2025. Hal ini mungkin disebabkan tidak tersedianya padang rumput untuk pengembalaan ternak (terutama ternak besar: sapi, kerbau dan kuda) di Kota Bogor saat ini maupun di masa yang akan datang sehingga sangat kecil peluang untuk pengembangan ternak besar dengan cara pengembalaan baik saat ini maupun dimasa mendatang.
 - c. **Sub sektor perikanan** kontribusinya juga menurun, yaitu 0,0412 % pada tahun 2010, 0,0322 % tahun 2015, 0,0249 % tahun 2020 dan 0,0191 % tahun 2025. Untuk komoditi ikan konsumsi di masa yang akan datang kemungkinan besar akan mengalami titik jenuh disebabkan jumlah areal kolam yang terbatas, sedangkan komoditi ikan hias di Kota Bogor masih dapat dikembangkan dikarenakan tidak terkait langsung dengan luas lahan, karena dapat diusahakan pada skala rumah tangga.
2. **Sektor pertambangan/Penggalian** sampai saat ini belum ditemukan potensi bahan tambang/galian di wilayah Kota Bogor.

B. Sektor Sekunder

Diperkirakan **kontribusi PDRB sektor sekunder Kota Bogor** yang sekarang ini sekitar 38,67 % dari total PDRB, akan semakin menurun dimasa mendatang. Pada tahun 2010 diperkirakan kontribusi PDRB sektor sekunder di Kota Bogor akan mencapai 38,53 % dari total PDRB dan akan menurun perannya menjadi 38,07 % pada tahun 2015, dan menurun lagi menjadi 37,30% pada tahun 2020, dan menjadi 36,21 % pada tahun 2025.

1. **Sektor Industri Pengolahan**, untuk sektor Industri pengolahan yang didominasi oleh industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit, diperkirakan akan makin menurun jumlahnya di Kota Bogor. Kontribusi sektor industri pengolahan diprediksi semakin menurun, yaitu 28,54 % pada tahun 2010, sempat naik mencapai 28,72 % tahun 2015, turun lagi menjadi 28,60 % tahun 2020 dan 28,16 % tahun 2025. Kecenderungan ini menggambarkan melambatnya perkembangan sektor industri di Kota Bogor, yang antara lain mungkin disebabkan oleh ketersediaan lahan untuk industri di Kota Bogor, pesatnya persaingan antar daerah serta perkembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi untuk industri, ada kecenderungan industri yang padat karya akan beralih ke daerah lain yang ongkos produksinya lebih rendah, dan penggunaan teknologi tinggi yang akan mereduksi jumlah pekerja. Tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kemampuan Kota Bogor dalam menarik investasi (perijinan dan kemudahan yang diberikan), dan meningkatkan efisiensi dan daya saing dengan menghasilkan produk yang berkualitas.
 - a. **Sub Sektor Sektor Listrik, Gas dan Air Minum** Tantangan utama yang dihadapi sektor energi seperti listrik dan gas adalah meningkatkan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang perlu diantisipasi dengan peningkatan dan pengembangan sumber-sumber daya energi tersebut. Kontribusi sektor listrik, gas dan air minum terhadap PDRB diprediksikan akan meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, yaitu 3,27 % pada tahun 2010, 3,36 % tahun 2015, 3,42 % tahun 2020 dan 3,43 % tahun 2025. Industri energi listrik di Kota Bogor akan menjadi semakin penting dimasa mendatang. Perbaikan teknologi dan peningkatan efisiensi perangkat listrik rumah tangga dan perangkat listrik pada industri diperkirakan belum akan mengurangi kebutuhan energi listrik. Penyediaan Gas di masa yang akan datang diperkirakan juga akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya perumahan di Kota Bogor.
 - b. **Sub Sektor air minum** di Kota Bogor, diperkirakan akan mirip dengan penyediaan gas dari PT. PGN dan listrik dari PLN. Jumlah pelanggan dan pemakaian air minum Kota Bogor diperkirakan akan meningkat terus, seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Oleh sebab itu penambahan kapasitas produksi air minum perlu mendapat perhatian penting.

2. Sektor Bangunan/Konstruksi

Perkembangan PDRB sektor Bangunan/Konstruksi Kota Bogor yang berasal dari Lapangan usaha bangunan dan konstruksi menurun terus yaitu 6,72 % pada tahun 2010, 5,99 % tahun 2015, 5,29 % tahun 2020 dan 4,62 % tahun 2025. Diperkirakan lapangan usaha ini akan terus menurun apabila tidak ada program konstruksi yang cukup besar di Kota Bogor.

C. Sektor Tersier

Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, lapangan usaha angkutan dan komunikasi, lapangan usaha bank dan lembaga keuangan lainnya, serta lapangan usaha Jasa-jasa. Selama lima tahun (2001-2005) terakhir **persentase PDRB sektor tersier Kota Bogor** mendominasi struktur perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 60,96 %. Hal ini menandakan dominasi sektor tersier terhadap PDRB Kota Bogor. Kecenderungan sektor ini di masa mendatang akan terus meningkat dan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Bogor. Diperkirakan kontribusi sektor tersier pada tahun 2010 naik menjadi 61,14 %, naik menjadi 61,62 % pada tahun 2015, 62,42 % pada tahun 2020 dan 63,52 % pada tahun 2025.

1. **Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.** Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selama ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor tersier. Kontribusi Sektor ini terhadap PDRB akan mengalami penurunan secara bertahap yaitu sebesar 27,57 % pada tahun 2010, 25,07 % pada tahun 2015, 22,58 % pada tahun 2020 dan 20,13 % pada tahun 2025.
 - a. Perkembangan **Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran** akan semakin besar di masa yang akan datang karena pertumbuhan penduduk kota Bogor yang semakin meningkat yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan penduduk, meskipun bila dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, persentasenya akan terlihat menurun semakin turun. Oleh sebab itu diperlukan kualitas fasilitas infrastruktur yang baik, karena perdagangan sangat mengandalkan mobilitas yang tinggi. Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 16,76 % dari PDRB Kota Bogor.
 - b. **Sub Sektor Hotel dan Restoran** diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 3,37 % terhadap PDRB Kota Bogor pada tahun 2025.

2. **Sektor Angkutan dan Komunikasi.** Salah satu potensi kota Bogor adalah di sektor perhubungan. Banyaknya kegiatan *commuter* (pulang-pergi) Jakarta-Bogor bagi sebagian besar warga Kota Bogor menyebabkan angkutan bus, angkot dan kereta api berkembang cepat di Kota Bogor. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, termasuk teknologi internet dan telepon seluler sangat membantu dalam memudahkan komunikasi masyarakat, namun hal ini menyebabkan komunikasi melalui Pos menjadi tidak efisien dan relatif mahal. Sektor angkutan dan Komunikasi pada tahun 2025 diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 10,04 % terhadap PDRB Kota Bogor.
3. **Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.** Kontribusi Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya diperkirakan cenderung meningkat di masa yang akan datang. Pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 16,65 %, 20,01 % tahun 2015, 23,79 % tahun 2020 dan 27,98 % pada tahun 2025.
4. **Sektor Jasa-Jasa.** Sektor jasa-jasa diperkirakan memberikan kontribusi 5,38 % terhadap PDRB Kota Bogor pada tahun 2025.

Masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan semata tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh sebab itu, penanganan masalah kemiskinan perlu lebih di tingkatkan lagi. Dengan intervensi sebesar 3 % per tahun, pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin akan turun menjadi 12.92 % dari jumlah penduduk. Intervensi dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan berlawanan, sehingga semakin besar intervensi menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin turun.

Laju penyerapan tenaga kerja sampai tahun 2025 per tahun untuk masing-masing sektor adalah sebesar 0,02 % (sektor primer), 2,67 % (sektor sekunder) dan 4,36 % (sektor tersier).

Untuk dapat menciptakan laju pertumbuhan perekonomian Kota Bogor sebagaimana tersebut di atas, maka sektor primer harus tumbuh dengan laju 4,92 %, sektor sekunder 6,13 % dan sektor tersier 6,82 %.

Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan ekonomi antar regional yang semakin ketat dan pesat serta semakin meluasnya proses globalisasi.

Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana penambahan penduduk di Kota Bogor masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai tingkat sekitar 71,41 % dari total penduduk pada periode sekitar 2025. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 83,09 %. Dengan demikian, perekonomian daerah di masa depan dituntut untuk dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menyediakan tambahan lapangan pekerjaan baru.

2.2.3. Sosial Budaya

Prediksi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang Kota Bogor akan menghadapi tingkat kenaikan jumlah penduduk yang semakin besar dan diperkirakan akan mencapai 1,5 juta pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian terhadap kualitas dan laju pertumbuhan penduduk tetap perlu diperhatikan.

Jumlah tenaga pendidik secara kualitas belum memadai, tetapi secara kuantitas telah terpenuhi dalam rangka memenuhi tingkat standar pelayanan minimum mutu pendidikan. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui rekrutmen tenaga pendidik yang sesuai dengan standar, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualifikasi guru, dan pelatihan bagi seluruh tenaga pendidik untuk mencapai pelayanan yang optimal.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi yang memerlukan perlakuan khusus baik TKLB, LB, A,B,C maupun jenjang SDLB, SMPLB, SMALB perlu upaya pendirian sekolah baru agar jumlahnya merata di setiap kecamatan.

Kualitas hidup, peran perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurang memadainya kesejahteraan, rendahnya partisipasi dan peran sertanya, serta rendahnya perlindungan terhadap anak. Selain itu dapat dilihat pula dari tingginya tingkat eksploitasi terhadap anak dibawah usia produktif. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang, dan memberikan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Secara umum derajat kesehatan di Kota Bogor sampai dengan tahun 2005 menunjukkan situasi relatif lebih baik dilihat dari angka kematian bayi menurun dari 35,70% menjadi 26,64 % dari perseribu kelahiran hidup akan tetapi perlu diperhatikan lebih lanjut mengingat prevalensi kurang gizi dan gizi buruk mencapai angka kenaikan 1,42% setiap tahunnya dan tingginya kasus angka kematian pada balita terhadap beberapa jenis penyakit seperti kasus diare dan kasus pneumonia yang mencapai angka 20.686 kasus diare dan 5.099 kasus pneumonia. Tantangan sampai dengan 20 tahun ke depan adalah peningkatan gizi bagi ibu dan anak baik sebelum melahirkan maupun pasca melahirkan.

Pembiayaan kesehatan, saat ini baru menjangkau 30% dari jumlah penduduk. Asuransi kesehatan belum menjadi suatu kebutuhan di masyarakat sehingga sampai dengan tahun 2025 diharapkan semua warga dapat menjadi peserta asuransi kesehatan. Sedangkan dalam pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin di Kota Bogor walaupun sudah terlayani 100 % tetapi jumlah orang miskin semakin meningkat sehingga diharapkan sampai dengan tahun 2025 diperlukan akurasi data gakin agar pembiayaan kesehatan bagi warga miskin tidak salah sasaran dan cakupan tetap 100%.

Penyediaan sarana kesehatan sampai saat ini penyebarannya belum merata terutama masalah sumber daya (manusia, sarana dan prasarana), demikian pula dengan pelayanan kesehatan rujukan, semua warga kota sudah terlayani namun masih banyak penduduk luar Kota Bogor yang juga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bogor yaitu sebanyak 40 %. Sampai dengan tahun 2025 diharapkan semua warga kota tetap dapat terlayani, untuk itu diperlukan partisipasi rumah sakit swasta dan penambahan jumlah sarana serta kerjasama lintas batas agar pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh warga di luar kota Bogor tidak mengurangi pelayanan bagi warga Kota Bogor.

Penataan lingkungan yang sehat, saat ini baru 60% masyarakat yang memiliki jamban, tidak adanya lahan untuk membuat jamban masih menjadi kendala pada sebagian masyarakat, diharapkan semua warga masyarakat memiliki jamban dan membiasakan diri berperilaku hidup sehat.

Perilaku hidup sehat, saat ini tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan kebiasaan berolah raga masih rendah, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya yang ada belum memadai, masyarakat begitu mudah mendapatkan rokok, narkoba dan seks bebas, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi seimbang masih kurang. Diharapkan sampai dengan tahun 2025 semua masyarakat terakses

pelayanan preventif, Kota Bogor terbebas dari rokok, narkoba dan seks bebas serta tidak ditemukan kasus gizi buruk.

Kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan masih sangat kurang serta belum terjangkaunya akses pelayanan kesehatan, sehingga banyak kasus DBD, HIV/AIDS yang tidak terdeteksi secara dini.

Pembangunan keluarga dan keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas penduduk dan pengendalian kelahiran antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 rata-rata setiap tahunnya hanya mencapai 15 %, namun pencapaian keluarga berencana (KB) yang tinggi secara kualitas masih rendah karena pemakaian alat kontrasepsi yang belum mantap. Tantangan sampai dengan 20 tahun yang akan datang di bidang keluarga berencana adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk ber KB, peningkatan penyuluhan kepada masyarakat bahwa KB tidak hanya didominasi oleh kaum perempuan.

Peningkatan pemberdayaan generasi muda Kota Bogor tidak diikuti dengan pembangunan di bidang kesejahteraan terutama bagi penyandang masalah sosial masyarakat seperti pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial, organisasi sosial dan organisasi perlindungan sosial masyarakat lainnya. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang adalah bagaimana mengikutsertakan seluruh elemen yang terkait dalam pembangunan pemberdayaan generasi muda dan mengoptimalkan kualitas mental pemuda yang belum terbangun secara kokoh sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan zaman.

Meskipun pembangunan di bidang kesejahteraan sosial semakin baik, namun berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih kompleks terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia karena keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai upaya pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah rawan sosial ekonomi, keterlantaran, kecacatan, serta kerentanan sosial bagi sejumlah masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang kesejahteraan sosial. Adapun tantangan kedepan bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, penyandang masalah sosial masih relatif tinggi (warga telantar, anak nakal & anak jalanan, WTS gelandangan & pengemis), menangani masalah kecacatan (anak cacat, penyandang cacat, penyandang cacat eks penyakit kronis) dan bagaimana menangani masalah Korban Napza dan HIV AIDS, yang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat.

Agama belum sepenuhnya dijadikan landasan kehidupan pribadi dan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya aliran keagamaan yang menyimpang dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat dan belum optimalnya peran pemuka agama dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah bagaimana mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari serta mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Dalam menjaga dan melestarikan kesenian dan kebudayaan di Kota Bogor, perlu upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap potensi seni dan budaya.

Untuk meningkatkan peran serta perempuan di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah perlu adanya pembangunan yang responsif gender, peningkatan kapasitas dan peranan kaum perempuan, peningkatan peran perempuan dalam bidang politik dan proses pengambilan keputusan, kesadaran akan hak-hak perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

2.2.4. Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Politik

Tantangan terberat dalam pembangunan politik 20 tahun yang akan datang, adalah bagaimana menjaga proses demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah reformasi struktur politik, proses politik dan budaya politik demokratis agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan.

Pada lingkup pemerintahan daerah, konsolidasi demokrasi perlu didukung dengan kebijakan daerah yang reformis dan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas, dan mandiri serta baik dan bersih.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tantangan ke depan adalah meningkatkan kesiapan aparatur pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa yang profesional. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, menjadikan pers sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik.

Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Tantangan ke depan di dalam pembangunan hukum adalah untuk mewujudkan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran serta bagaimana mencipakatan masyarakat Kota Bogor mampu menjunjung tinggi supremasi hukum.

Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang agar lebih optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Selain itu, untuk 20 tahun yang akan datang segala kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus responsif gender.

2.2.5. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan oleh Kota Bogor dalam pembangunan. Modal dasar tersebut sekaligus menjadi penciri/identitas yang membuat Kota Bogor berbeda dengan kota-kota lainnya. Adapun modal dasar tersebut adalah :

1. Jumlah penduduk Kota Bogor yang relatif besar menciptakan potensi demand yang tinggi sehingga membuka peluang pengembangan aktivitas ekonomi yang makin beragam.
2. Posisi Kota Bogor yang strategis sehubungan dengan letaknya yang berdekatan dengan ibukota negara dan berada pada jalur lintasan pergerakan transportasi selatan-utara dan timur-barat.
3. Kenyamanan lingkungan Kota Bogor yang menyegarkan menjadi daya tarik tersendiri yang membuat orang akan semakin tertarik untuk menghabiskan waktu beristirahat, beraktivitas dan berkreativitas di Kota Bogor.

4. Kondisi politis yang cukup demokratis dan tingkat keamanan yang cukup kondusif.
5. Banyaknya fasilitas pendidikan berupa pusat-pusat penelitian (balai penelitian) serta perguruan tinggi berskala nasional dan internasional.
6. Adanya beberapa peninggalan sejarah berskala internasional seperti Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor.
7. Keragaman etnis masyarakat kota Bogor yang berpotensi mendorong timbulnya nilai-nilai luhur amanah dan bermartabat, komitmen dan kerja keras, cerdas dan ulet, silih asah, silih asih dan silih asuh.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2005-2025

Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan Kota Bogor, perlu dikembangkan nilai-nilai luhur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan agar cita-cita masyarakat Kota Bogor dapat dicapai dan berhasil dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan dikembangkan dari masyarakat tersebut harus selalu dihayati dan diamalkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi “semangat” dalam berkarya dan berkarsa.

Nilai-nilai luhur ini menjadi acuan penetapan visi/misi agar sesuai dengan kepribadian dan kondisi Kota Bogor, dan sekaligus agar visi yang telah disepakati bersama dapat tercapai.

Berdasarkan kondisi Kota Bogor saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Bogor, serta hasil kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Bogor, visi pembangunan daerah Kota Bogor tahun 2005-2025 adalah :

**KOTA JASA YANG NYAMAN DENGAN MASYARAKAT MADANI DAN
PEMERINTAHAN AMANAH**

Visi tersebut mengandung makna :

1. Kota Jasa mengandung pengertian bahwa Kota Bogor menjadi pusat jasa dalam pengertian pelayanan (*services*) dan sektor ekonomi tersier (*economic activities*). Kota Bogor akan diarahkan untuk menjadi suatu kota yang aktivitas masyarakatnya bergerak terutama di sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang mendukung bagi berkembangnya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat baik aktivitas budaya, ekonomi, penataan fisik kota, maupun penanganan masalah kota. Sektor ini perlu diprioritaskan untuk mendorong perekonomian Kota Bogor, terutama pada sub sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya.
2. Nyaman berarti bahwa Kota Bogor diharapkan menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan.
3. Masyarakat madani berarti bahwa masyarakat Kota Bogor harus memiliki derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi keimanan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*).
4. Pemerintahan amanah yaitu pemerintahan yang baik yang senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang prima di segala bidang serta terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Bogor tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. **Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada** adalah pembangunan diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengembangan sektor jasa agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan**, adalah pembangunan diarahkan kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan

lingkungan. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat kota dapat merasakan kenyamanan kotanya.

3. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera** adalah pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri.
4. **Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum**, adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan **Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah**. Ukuran tercapainya Kota Bogor sebagai Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- A. **Berkembangnya Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor jasa yang menjadi basis aktifitas ekonomi.
 2. Meningkatnya kompetensi, produktifitas, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

3. Meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif.
4. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
5. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.
6. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan pada tahun 2025

B. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
2. Terbangunnya konsep pembangunan yang nyaman dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya penataan ruang dan pertanahan.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk perlindungan masyarakat dari bencana.
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota.
6. Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah.

C. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, cerdas, toleran, gotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam semua sektor pembangunan dan IPTEK

4. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

D. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan.
2. Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur berdasarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik.
3. Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika.

4.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

4.1.1 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada

Terciptanya perekonomian masyarakat yang menitikberatkan pada jasa dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, merupakan suatu upaya peningkatan kemampuan ekonomi rakyat. Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada :

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.
2. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

3. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.
5. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak.
6. Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.
7. Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.
8. Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.
9. Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya.

10. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.
11. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek dan berdaya saing khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

4.1.2 Mewujudkan Kota Yang Bersih, Indah, Tertib Dan Nyaman (Beriman) Dengan Sarana Prasarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berwawasan Lingkungan

Peran pemerintah lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial. Pembangunan di bidang fisik dan prasarana diarahkan pada :

1. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman.
2. Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan utilitas lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata.
3. Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang.
4. Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi secara regional.

5. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai.
6. Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan jaringan utilitas kota yang dilakukan secara terpadu.
7. Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.

4.1.3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berketerampilan, Sehat Cerdas Dan Sejahtera

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Pembangunan di bidang sosial budaya diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
3. Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
4. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berketerampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau.

5. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin.
6. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Pembangunan kesehatan harus berwawasan kesehatan yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara integral dengan pembangunan sektor lain dan lintas batas dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
8. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.
9. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
10. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah.
11. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat.
12. Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki.
13. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan.
14. Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat.

4.1.4 Mewujudkan Pemerintahan Kota Yang Efektif Dan Efisien Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

Pembangunan di bidang Pemerintahan diarahkan pada :

1. Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor.
2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima.
3. Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminasi dengan sanksi hukum yang tegas.
4. Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif.
5. Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik.
7. Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan.

4.2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bogor dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi (IPM = 80), diproyeksikan dapat terwujud pada tahapan RPJM Daerah ketiga yang merupakan komitmen bersama antara pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan pemerintahan Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

RPJM Daerah ke-1 (2005-2009)

Tahapan pembangunan tahap pertama di Kota Bogor secara kebijakan perencanaan masih berlaku Renstra Kota Bogor (2005-2009) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2004. Pelaksanaan pembangunan tahap pertama lebih diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu pelaksanaan pembangunan pada tahap I (2005-2009) diarahkan juga kepada pemenuhan dasar seperti peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli serta peningkatan supremasi hukum aparaturnya.

4.2.2. RPJM Daerah ke-2 (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM Daerah ke-1, RPJM Daerah ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bidang ekonomi Lebih diprioritaskan kepada penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah . Investasi diarahkan pada penyiapan sarana prasarana , promosi investasi serta iklim investasi yang kondusif sehingga Kota Bogor menjadi daerah tujuan investasi khususnya di sektor tersier.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilakukan melalui tahap peningkatan kapasitas SDM KUMKM, perkuatan kelembagaan , peningkatan akses pasar, serta pemberdayaan KUMKM.

Peningkatan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas , dan kesejahteraan pekerja.

Peningkatan pariwisata dilakukan dengan penataan objek dan daya tarik wisata di kawasan yang mempunyai potensi wisata . Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan yang berbasis masyarakat serta peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata.

Bidang Fisik dan Prasarana. Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya serta memantapkan infrastruktur yang telah ada.

Sistem transportasi dilakukan dengan sistem transportasi yang mendukung kepada aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.

Kualitas perencanaan tata ruang dan konsistensi pemanfaatan ruang semakin baik yang ditandai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang RTRW, kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan rencana tata ruang yang lebih rinci (Rencana Detail Tata Ruang), sehingga menciptakan kondisi kota yang nyaman yang ditandai dengan kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terkendali, tertatanya sumber mata air, dan kawasan resapan.

Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara integrasi dengan terus memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan melalui penetapan tata ruang. Kelestarian sistem ekologi kota terus memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan untuk pengamanan kota dari bencana

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pada sarana prasana air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana prasana telekomunikasi.

Bidang Sosial Budaya. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) melalui Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Penanganan pendidikan dilaksanakan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah. Penyelenggaraan pendidikan non formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih tetap dilaksanakan. Sedangkan beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pembangunan di sektor Kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan lingkungan hidup yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan.

Pada sektor kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan mempertahankan cagar budaya yang ada di Kota Bogor.

Pemuda dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan sarana prasarana atau fasilitas kepemudaan dan olahraga. Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui peningkatan kualitas pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan.

Pembangunan di sektor Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Pada bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga, menurunkan angka kelahiran bayi (CBR), peningkatan peserta KB baru. Untuk peningkatan ketahanan keluarga diarahkan untuk membentuk kelompok bina keluarga seperti BKB dan BKR .

Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah. Perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta peningkatan kualitas aparat hukum dan lembaga peradilan.

Pembangunan aparatur diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Peningkatan koordinasi antar pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun antar pemerintah kabupaten /kota yang lain. Hubungan harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terus ditingkatkan. Pelayanan publik secara bertahap terus ditingkatkan menjadi suatu pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien serta akuntabel.

Reformasi Birokrasi terus ditingkatkan guna memenuhi perkembangan kebutuhan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah aparat di pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan semua instansi harus sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasi Pelayanan (SOP).

Pembangunan di bidang Politik diarahkan pada peningkatan dan pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan dan pemantapan peran dan fungsi partai politik. Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan masyarakat madani, pengembangan kelembagaan demokrasi, harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif.

4.2.3. RPJM Daerah ke-3 (2015-2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM Daerah ke-2, RPJM Daerah ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh.

Bidang ekonomi. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi.

Pengembangan KUMKM terus dilaksanakan di berbagai sektor perekonomian dengan meningkatkan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

Pembangunan sektor industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif. Pengembangan serta peningkatan kualitas industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang serta pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri.

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada pengayaan obyek wisata Kota Bogor, dimana persaingan kepariwisataan akan semakin tajam, oleh karena itu Kota Bogor dituntut untuk terus menggali potensi sumberdaya agar berdaya jual, diminati, dan dikunjungi wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Di sektor ketenagakerjaan terus diadakan peningkatan kompetensi dan daya saing, peningkatan sarana prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Bidang Fisik dan Prasarana. Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas, pemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang terpadu antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya.

Pengembangan seluruh sistem jaringan utilitas kota diarahkan pada sistem terpadu dengan konstruksi *ducting system*. Sistem ini akan meningkatkan keamanan jaringan utilitas serta meningkatkan kualitas estetika kota.

Perencanaan tata ruang kota akan selalu memprioritaskan kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan seperti kawasan lindung serta kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana. Kawasan-kawasan tersebut tetap dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak terbangun. Selain itu kawasan budaya peninggalan masa lalu (Cagar budaya) baik berupa bangunan maupun situs perlu dilestarikan.

Dalam upaya pencegahan degradasi lingkungan, dilakukan peningkatan kuantitas resapan limpahan air permukaan dalam upaya mengembalikan kandungan air tanah dan mengendalikan daya tampung sungai seiring dengan meningkatnya luas lahan terbangun. Mengembalikan fungsi konservasi kawasan bantaran sungai, perlindungan mata air, sumur resapan dan pengalokasian ruang terbuka hijau (RTH) kota dilakukan secara bertahap dengan pendekatan partisipatif.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pada sarana prasana air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana prasana telekomunikasi terus ditingkatkan guna meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Bidang Sosial Budaya. Sasaran utama pada bidang pendidikan masih kepada penuntasan program wajib belajar 13 (tiga belas) tahun. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB), serta ditingkatnya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui rekrutmen tenaga pendidik dan memberikan pelatihan bagi seluruh tenaga pendidik untuk mencapai pelayanan yang optimal.

Di sektor kesehatan pembangunan diupayakan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Pembangunan pada sektor keagamaan di prioritaskan pada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan.

Sektor kebudayaan masih diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya lokal dan mempertahankan cagar budaya (*heritage*).

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana olah raga dan kualitas atlet, sehingga mampu berprestasi pada ajang olahraga nasional maupun internasional.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di prioritaskan pada upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga, menurunkan angka kelahiran bayi (CBR) dan peningkatan peserta KB baru. Untuk peningkatan ketahanan keluarga diarahkan terus untuk membentuk kelompok bina keluarga seperti BKB dan BKR .

Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum dan pemantapan penegakan hukum. Pada tahap ini selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan profesionalisme aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan diorientasikan pada pengembangan pelayanan organisasi pemerintahan.

Pembangunan bidang politik diarahkan pada perwujudan demokrasi proses politik, membangun kemandirian organisasi politik serta pemantapan masyarakat madani. Pada tahapan ini dilakukan upaya perluasan akses masyarakat dalam partisipasi politik melalui kelembagaan.

4.2.4. RPJM ke-4 (2020-2024)

Pelaksanaan dan pencapaian RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai **Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah** melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Ekonomi tetap menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian jasa layanan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya dengan telah terbangunnya kemitraan kelompok-kelompok perekonomian antar wilayah yang telah dicapai pada RPJM ke-3 (tiga), peningkatan perekonomian wilayah di Kota Bogor dititikberatkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan jejaring sentra ekonomi baik lokal maupun antar wilayah dengan penerapan pengelolaan sumber daya manusia yang madani sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Di sektor pariwisata, pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi pariwisata serta pemantapan pelestarian kesan dan citra Kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktifitas.

Sektor KUMKM diarahkan pada pemantapan jaringan kelembagaan untuk mengatasi persaingan global melalui kemitraan yang bersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan oleh semua komponen yang terkait.

Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, dalam tahap ini diupayakan pada peningkatan pemasaran prospek investasi dan pemantapan regulasi di bidang investasi.

Bidang Fisik dan Prasarana. Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang terpadu antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya.

Pengembangan seluruh sistem jaringan utilitas kota diarahkan pada sistem terpadu dengan konstruksi *ducting system*. Sistem ini akan meningkatkan keamanan jaringan utilitas serta meningkatkan kualitas estetika kota.

Perencanaan tata ruang kota akan selalu memprioritaskan kawasan-kawasan yang harus diselamatkan seperti kawasan lindung serta kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana. Kawasan-kawasan tersebut tetap dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak terbangun. Selain itu kawasan budaya peninggalan masa lalu (Cagar budaya) baik berupa bangunan maupun situs perlu dilestarikan.

Dalam upaya pencegahan degradasi lingkungan, dilakukan peningkatan kuantitas resapan limbah air permukaan dalam upaya mengembalikan kandungan air tanah dan mengendalikan daya tampung sungai seiring dengan meningkatnya luas lahan terbangun. Mengembalikan fungsi konservasi kawasan bantaran sungai, perlindungan mata air, sumur resapan dan pengalokasian ruang terbuka hijau (RTH) kota dilakukan secara bertahap dengan pendekatan partisipatif.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pada sarana prasana air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana prasana telekomunikasi terus ditingkatkan guna meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Bidang Sosial Budaya. Sasaran utama pada bidang pendidikan diarahkan pada penuntasan program wajib belajar 15 (lima belas) tahun. Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB), serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pemantapan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap merupakan sasaran prioritas. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui rekrutmen tenaga pendidik dan pelatihan terus dilaksanakan.

Pembangunan di sektor kesehatan diupayakan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Pembangunan pada sektor keagamaan di prioritaskan pada pemantapan kerukunan hidup umat beragama dalam mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman serta pengamalan agama dalam kehidupan.

Sektor kebudayaan diprioritaskan pada upaya pemantapan pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan mempertahankan cagar budaya (*heritage*).

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada pemantapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana olah raga dan kualitas atlet sehingga mampu berprestasi pada ajang olahraga nasional maupun internasional.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada pemantapan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pemantapan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan social.

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera diarahkan pada pemantapan kualitas keluarga, menurunkan angka kelahiran bayi (CBR), peningkatan peserta KB baru. Untuk peningkatan ketahanan keluarga diarahkan terus untuk membentuk kelompok bina keluarga seperti BKB dan BKR.

Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada pemantapan penerapan produk hukum dan penegakan hukum. Pada tahap ini, selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan profesionalisme aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan diorientasikan pada pengembangan pelayanan organisasi pemerintahan.

Pembangunan bidang politik diarahkan pada pemantapan pelaksanaan proses demokrasi politik, membangun kemandirian organisasi politik serta pemantapan masyarakat madani. Pada tahapan ini dilakukan upaya perluasan akses masyarakat dalam partisipasi politik melalui kelembagaan.

Tahapan pembangunan dan skala prioritas dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sideway

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 sesuai dengan fungsinya adalah sebagai dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada setiap sektor atau bidang pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor diharapkan dapat menjadi:

1. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPd.
2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan baik di tingkat pusat maupun Provinsi.
3. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kota Bogor dalam mewujudkan visi dan misi perlu didukung (1) Komitmen dari kepemimpinan Daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) (3) Konsistensi kebijakan pemerintah kota; (4) Keberpihakan kepada ekonomi rakyat; dan (5) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik; dan (7) Dukungan Pemerintah Provinsi .

Untuk itu RPJPD Kota Bogor 2005-2025 agar menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kota Bogor selama kurun waktu 20 tahun mendatang.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

